

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN DAN
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**

DI KELURAHAN BATU SEMBILAN

KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota**

Oleh:

**YULIANTI
L4D0003113**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN DAN
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**

DI KELURAHAN BATU SEMBILAN

KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

**Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro**

Oleh :

**YULIANTI
L4D0003113**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 2 Januari 2006
Dinyatakan Lulus/Tidak Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Magister Teknik

Semarang, 2 Januari 2006

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Ir. Sunarti, MT

Ir. Parfi Khadiyanto, MSL

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof.Dr.Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, Januari 2006

YULIANTI
L4D0003113

TESIS INI AKU PERSEMBAHKAN
UNTUK ORANG-ORANG YANG AKU SAYANGI:

*Suamiku tercinta Harpomo
Dan anak-anaku tersayang
Harya Ajiseno dan Melody Trusty*

ABSTRAK

Di Kelurahan Batu Sembilan, masih terdapat adanya masalah, antara lain: adanya fenomena yang menunjukkan lingkungan permukiman yang tidak terpelihara seperti: sampah-sampah yang berserakan, bau yang tidak sedap, saluran air yang tersumbat, kurangnya pengetahuan masyarakat dan kuatnya keyakinan sebagian masyarakat dalam menggunakan sampah sebagai bahan pemupukan lahan pertanian; perilaku/ sikap masyarakat yang kurang memperhatikan arti pentingnya kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, patut untuk dikaji bagaimana partisipasi mereka terhadap pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman. Sedangkan sasaran yang akan dilakukan meliputi mengidentifikasi organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman.

Pendekatan studi yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi empirik yang ditemukan di lapangan. Pengumpulan data ini terbagi atas pengumpulan data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang merupakan metode untuk melakukan kajian terhadap partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan di Kelurahan Batu Sembilan dipengaruhi oleh karakteristik masyarakatnya, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, mata pencaharian, penghasilan, dan suku/etnis. Masyarakat hanya senang memasuki organisasi informal yang beraktivitas seni budaya. Dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman, khususnya dalam perbaikan rumah tinggal, ternyata sebagian masyarakat mendapat bantuan dari pemerintah. Masyarakat mau berpartisipasi jika kegiatan tersebut berskala kecil.

Rekomendasi studi ini adalah perlunya pembinaan partisipasi dari pihak pimpinan Kecamatan Tanjungpinang Timur maupun Lurah Batu Sembilan agar masyarakat dapat lebih banyak memiliki tanggungjawab untuk memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman secara optimal.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

ABSTRACT

In Sub-district of Batu Sembilan, there are still several problems, for example: existing of phenomenon that demonstrate the residence environment was not maintained such as: trashes that be scattered around, stench, the stopped water lines, lack of society awareness and be fervent of beliefs by most people in using trashes as matters of agriculture manure; behaviors/attitudes of society are less take not of its health importance of environment. Furthermore, proper to be inspected how about their participation for maintenance and improvement of residence environment. The purpose of this research is inspecting the participation by society within improvement and maintenance of the residence environment. Whereas the objectives that been done involving the identifying of organization which formed by society, and the participation by society in improvement and maintenance efforts of residence environment.

The study approach had been done in this research based on empirical condition that founded in field. The collecting data divided upon the primary and secondary data collecting. The analysis which been used is qualitative description that is a method to do inspection for the participation by society in improvement. The result of this study demonstrate that the participation by society on improvement and maintenance of environment in sub-district of Batu Sembilan were influenced by characteristic peoples', such as gender, age, education, occupation, income, and ethnic. The society was comfortable only joining the informal organization that activate in a culture art. By improving and maintenance of residence, especially in residence improvement, in fact the most people get an aid by government. The society is agreeable to participate if the activities have a minor scale. The study recommendation needs the guidance of participation by district head of Tanjungpinang although sub-district head of Batu Sembilan in order to society be more have a responsibility to maintain and improve the residence optimally.

Keywords: The participation by society

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmah, dan hidayah-Nya lah maka penyusun dapat menyelesaikan Laporan Pra-Tesis ini. Mata kuliah Pra-Tesis merupakan salah satu syarat kurikulum yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro.

Dalam kesempatan ini tak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam melaksanakan dan menyusun laporan ini, yaitu :

1. Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA; selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro.
2. Ir. Ragil Haryanto, MSP; selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
3. Ir. Parfi Khadiyanto, MSL; selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis yang telah memberikan arahan selama ini..
4. Ir. Sunarti, MT; selaku Dosen Pembimbing Pendamping Tesis yang telah memberikan bimbingan selama ini.
5. Perpustakaan Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
6. Perpustakaan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
7. Keluarga yang telah memberikan dukungan baik secara materiil maupun spirituil dalam penyusunan laporan ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu dikoreksi, karena itu penyusun menerima masukan-masukan yang bersifat membangun. Semoga laporan tesis ini dapat berguna bagi mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro serta pembaca pada umumnya.

Semarang, Januari 2006
Penyusun,

Yulianti

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan	8
1.3.2 Sasaran	8
1.3.3 Manfaat Penelitian	9
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial	9
1.4.2 Ruang Lingkup Spatial.....	10
1.5 Kerangka Pemikiran.....	15
1.6 Metode penelitian.....	17
1.6.1 Pendekatan Studi.....	17
1.6.2 Metode Deskriptif	27
1.6.3 Unit Analisis, Populasi, Sampel dan Responden	28
1.7 Sistematika Penulisan	29
BAB II KAJIAN LITERATUR TENTANG PARTISIPASI	
MASYARAKAT.....	31
2.1 Partisipasi	31
2.2 Beberapa Pengertian Mengenai Sanitasi Infrastruktur.....	48
2.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Program.....	49
2.4 Permukiman Kumuh Perkotaan	54
2.5 Rangkuman Kajian Teori	57

BAB III	GAMBARAN UMUM KELURAHAN BATU SEMBILAN....	60
3.1	Struktur Ruang Kawasan Terhadap Kota Tanjungpinang	60
3.2	Gambaran Umum Kecamatan Tanjungpinang Timur.....	61
3.3	Gambaran Umum Kelurahan Batu Sembilan.....	62
3.3.1	Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Batu Sembilan.....	71
3.3.2	Kondisi Sosial Ekonomi.....	72
3.3.3	Kondisi Kesehatan Masyarakat.....	73
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI KELURAHAN BATU SEMBILAN	78
4.1	Karakteristik Responden.....	78
4.2	Analisis terhadap Penilaian Partisipasi Masyarakat.....	85
4.3	Analisis Terhadap Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman	97
4.4	Rangkuman Analisis	108
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	110
5.1	Kesimpulan	110
5.2	Rekomendasi	113
	Daftar Pustaka	114
	Kuesioner	117
	Daftar Riwayat Hidup	120

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: Variabel Analisis.....	21
TABEL I.2	: Variabel yang Digunakan Dalam Penilaian	26
TABEL II. 1	: Rangkuman Kajian Teori-teori Partisipasi.....	59
TABEL III.1	: Jumlah Penduduk Dalam Wilayah RT.....	63
TABEL III.2	: Keadaan Penduduk Menurut Agama	64
TABEL III.3	: Keadaan Penduduk Menurut Umur.....	65
TABEL III.4	: Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	66
TABEL III.5	: Keadaan Sarana Pendidikan.....	67
TABEL III.6	: Keadaan Sarana Ibadah/ Agama	67
TABEL III.7	: Keadaan Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis.....	68
TABEL III.8	: Keadaan Sarana Jalan.....	69
TABEL III.9	: Keadaan Sarana Pengangkutan dan Komunikasi.....	70
TABEL III.10	: Keadaan Sarana dan Prasarana Sosial.....	71
TABEL IV.1	: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	78
TABEL IV.2	: Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	79
TABEL IV.3	: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	80
TABEL IV.4	: Karakteristik Responden Berdasarkan Mata Pencaharian	81
TABEL IV.5	: Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Rata-rata Dalam Satu Bulan	82
TABEL IV.6	: Karakteristik Responden Berdasarkan Suku/Etnis.....	83
TABEL IV.7	: Rekapitulasi Karakteristik Responden	84
TABEL IV.8	: Penilaian Responden tentang Bentuk Organisasi yang Diikuti	86
TABEL IV.9	: Penilaian Responden tentang Aktivitas Organisasi.....	89
TABEL IV.10	: Penilaian Responden tentang Keikutsertaan Masyarakat Dalam Organisasi.....	90
TABEL IV.11	: Penilaian Responden tentang Intensitas Kehadiran Dalam Pertemuan Masyarakat.....	92
TABEL IV.12	: Penilaian Responden tentang Intensitas Memberi Sumbangan.....	94
TABEL IV.13	: Rekapitulasi Penilaian Masyarakat tentang Organisasi yang Diikuti Masyarakat Di Kelurahan Batu Sembilan	96
TABEL IV.14	: Perbaikan Responden Tentang Perbaikan dan Pemeliharaan Rumah Tinggal.....	98
TABEL IV.15	: Penilaian Responden Tentang Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Permukiman	100
TABEL IV.16	: Penilaian Responden tentang Perbaikan dan Pemeliharaan Prasarana Permukiman.....	102
TABEL IV.17	: Penilaian Responden tentang Sikap Sosial Masyarakat.....	104
TABEL IV.18	: Penilaian Responden tentang Program Pemerintah	105

TABEL IV.19 : Rekapitulasi Penilaian Masyarakat Dalam Peeliharaan dan Perbaikan Lingkungan Permukiman di Kelurahan Batu Sembilan.....	107
TABEL IV.20 : Rangkuman Analisis Jawaban Responden.....	108

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: Peta Kota Tanjungpinang.....	11
GAMBAR 1.2	: Peta Kecamatan Tanjungpinang Timur.....	12
GAMBAR 1.3	: Peta Kelurahan Batu Sembilan.....	13
GAMBAR 1.4	: Peta Wilayah Studi.....	14
GAMBAR 1.5	: Skema Kerangka Pemikiran.....	16
GAMBAR 2.1	: Tipologi Penilaian Masyarakat Tentang Partisipasi Masyarakat Dari Arnstein	41
GAMBAR 3.1	: Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Batu Sembilan	72
GAMBAR 3.2	: Lokasi: Jl. DI. Panjaitan Km 10 (Depan Masjid Raya) Kelurahan Batu Sembilan	74
GAMBAR 3.3	: Lokasi: Kampung Sidomulyo Kel. Batu Sembilan	74
GAMBAR 3.4	: Lokasi: Jl. Hang Lekir Km 10 (Menuju Gereja Pantekosta) Kel. Batu Sembilan.....	75
GAMBAR 3.5	: Lokasi: Komplek Perumahan Bumi Indah dan Kawasan Bintan Center (belakang Pasar Bintan Center Kel. Batu Sembilan)	75
GAMBAR 3.6	: Kondisi Permukiman Warga Kampung Sidorejo.....	76
GAMBAR 3.7	: Kondisi Permukiman Warga Kampung Tobongbata	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini para sarjana ilmu-ilmu sosial ramai membicarakan masalah partisipasi masyarakat yang dikaitkan dengan kesadaran bahwa orientasi pembangunan dengan dasar pemikiran merembes ke bawah (*top-down*) nampaknya tidak sepenuhnya dapat memenuhi hasil-hasil yang diharapkan, karena kurang memperhatikan persoalan partisipasi masyarakat dan masyarakat hanya dijadikan sebagai objek semata.

Pola pembangunan yang demikian tidak saja kurang mampu menarik ikut sertanya masyarakat, tetapi juga mengakibatkan mereka semakin tertinggal dan tersisih. Berdasarkan pengalaman yang kurang menggembirakan itu, kini pemerintah Kota Tanjungpinang harus berpaling pada orientasi bahwa pelaksanaan pembangunan tidak saja untuk dan oleh masyarakat, melainkan harus pula dipadukan dengan dan bersama masyarakat. Masalah tersebut jelas menyangkut perluasan partisipasi masyarakat.

Pengertian partisipasi adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar, demikian antara lain yang dijelaskan dalam *Encyclopedia of Sosial Science Vol.12* (1994: 43). Sedangkan menurut Evers (1989: 67) partisipasi mempunyai hubungan dengan kebutuhan pokok, yaitu partisipasi perbaikan kampung misalnya diwujudkan dalam bentuk membuang sampah pada tempatnya,

membersihkan saluran air, membuat WC umum dan lain-lain. Selain itu partisipasi juga mempunyai hubungan dengan kebutuhan pokok, misalnya memilih dan dipilih sebagai Lurah/ Kepala Kelurahan atau Ketua RW/ RT atau anggota DPRD atau LPM dan sebagainya.

Usman (1985: 46) menjelaskan bahwa pada hakekatnya partisipasi sama artinya dengan gotong-royong. Gotong-royong terdiri dari dua kata, yaitu gotong berarti semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari semua karya secara bersama-sama, sedangkan royong berarti membagi hasil karya masing-masing dan menerima bagian-bagiannya sendiri sesuai dengan sumbangan karyanya.

Sedangkan Kalsom (1988: 12) menyatakan bahwa gotong-royong adalah pembangunan bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama. Amal semua buat kepentingan bersama, keringat semua buat bagian semua.

Ada dua unsur pokok mengapa partisipasi itu penting. *Pertama* alasan etis, yaitu dalam arti pembangunan demi manusia berpartisipasi sebagai subyek, manusia tidak akan menjadi manusia bila semata-mata ia hanya menjadi obyek; *Kedua* alasan sosiologis, yaitu bila pembangunan diharapkan berhasil dalam jangka panjang tidak bisa tidak ia harus menyertakan sebanyak mungkin orang, kalau tidak pembangunan parti akan macet.

Sehubungan dengan yang terakhir ini, pembangunan harus bertolak dari kenyataan yang ada meliputi baik sikap mental maupun struktur masyarakat. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk menyadari kebutuhannya dan berusaha

menghindari segala hambatan untuk mencapai kebutuhan tersebut. Penyadaran masyarakat tidak dapat dengan cara indoktrinasi, tetapi melalui aktivitas mereka sendiri. Untuk itu harus dijauhkan anggapan bahwa masyarakat itu bodoh, sebab mereka banyak mengetahui apa yang mereka butuhkan.

Masyarakat juga diharapkan dapat menyadari akan kebutuhan pokok mengenai permukiman yang sehat, mereka harus diberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya permukiman yang bersih dan sehat melalui berbagai media sosialisasi atau pelaksanaan program pemerintah yang lebih menitik beratkan kepada peningkatan partisipasi masyarakat setempat, sehingga mereka lebih banyak memiliki tanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan atau bahkan meningkatkan lebih baik.

Dalam kaitan tersebut, tidak berlebihan jika Zein (1989:67) menyatakan bahwa lingkungan permukiman sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Penduduk yang menempati lingkungan permukiman yang sehat umumnya sehat-sehat, sebaliknya yang menempati lingkungan permukiman yang jelek dan tidak teratur mereka sering menderita bermacam-macam penyakit, sehingga menyebabkan banyak kematian di kalangan anak-anak yang berumur di bawah lima tahun. Penyakit yang timbul karena jeleknya lingkungan permukiman itu, misalnya TBC, radang paru, bronchitis, tipus, disentri, influenza, campak, cacar, malaria dan sebagainya.

Tak dapat disangkal bahwa masih banyak yang belum dapat dibangun, antara lain kesempatan kerja yang belum seimbang dengan angkatan kerja yang makin meningkat sampai 2,5% setahun (BPS Kota Tanjungpinang, 2002). Selain

itu juga belum dapat menambah penghasilan di kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga jumlahnya mencapai 23,8% dari jumlah penduduk Kota Tanjungpinang (Disnakersos Kota Tanjungpinang, 2002).

Disamping masalah ekonomi terdapat masalah lingkungan permukiman yang menyangkut permukiman yang erat hubungannya dengan berbagai faktor, seperti masalah tata guna tanah, kepadatan penduduk, penyediaan air minum, penyediaan fasilitas pelayanan umum, pembuangan sampah, pencemaran air oleh kegiatan industri, pencemaran udara, kesehatan lingkungan, dan sebagainya.

Beberapa tahun terakhir ini perhatian masyarakat Tanjungpinang terhadap lingkungan permukiman bertambah besar. Berbagai ceramah, seminar, rapat kerja dan pertemuan diselenggarakan oleh berbagai kalangan pemerintah maupun masyarakat. Masalah lingkungan permukiman ini merupakan masalah yang pelik dan berkaitan satu sama lain, sehingga penanggulangannya harus dilaksanakan secara terpadu melalui berbagai kebijaksanaan, strategi, perencanaan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan (*sustainable*).

Diperkirakan kurang lebih 30% atau \pm 52.529 jiwa (Kantor Kimpraswil Kota Tanjungpinang, 2002) penduduk Kota Tanjungpinang bertempat tinggal di perkampungan dengan keadaan fisik dan sosial ekonomi yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Keadaan fisik perkampungan itu dapat dilihat pada rumah penduduk yang merupakan bangunan yang tidak permanen, jalan-jalan yang belum diaspal, saluran air yang tidak teratur, pembuangan sampah/kotoran sembarangan, penerangan rumah tanpa listrik, tidak mempergunakan air bersih serta rendahnya penilaian masyarakat tentang pendidikan.

Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah berusaha keras untuk memperbaiki lingkungan permukiman ini melalui proyek-proyek pembangunan sarana/prasarana kota, seperti pelebaran dan peningkatan jalan, permukiman penduduk, perbaikan saluran air di tepi jalan raya, pusat-pusat pertokoan/perbelanjaan, gedung sekolah, sarana kesehatan dan sebagainya, namun demikian belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh mengingat keterbatasan biaya, peralatan dan fasilitas lainnya (Dinas Kimpraswil Kota Tanjungpinang, 2005).

Selain melalui proyek-proyek pembangunan tersebut, masyarakat juga ikut serta secara aktif berpartisipasi memperbaiki lingkungan permukiman dengan jalan bergotong-royong, misalnya Coremap yang sudah berkiprah di Kabupaten Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang sejak tahun 1993, khususnya dalam hal perbaikan lingkungan biota laut, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan wadah penyampaian dan penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Berbicara mengenai lingkungan permukiman, nampaknya patut diperhatikan di kawasan Kelurahan Batu Sembilan, khususnya di kawasan Sidorejo, Bangunrejo dan sekitarnya, dimana sebagian masyarakat masih menggunakan sampah sebagai bahan penyubur tanaman pertanian (pupuk). Tidak dapat disangkal bahwa kondisi lingkungan permukiman di kawasan tersebut sangat tidak sehat, timbulnya pencemaran lingkungan seperti: bau yang kurang sedap, lahan yang kotor/jorok karena tertutup oleh sampah yang berserakan dan membusuk. Hal ini menunjukkan perilaku/ sikap masyarakat masyarakat yang

kurang memperhatikan arti pentingnya kesehatan lingkungan. Gambaran yang dapat dilihat di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang tersebut pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai daerah kumuh (slum) dan patut untuk dikaji bagaimana penilaian masyarakat tentang partisipasi mereka terhadap pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman mereka yang sehat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, kiranya menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penilaian masyarakat tentang partisipasi di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur guna menuju pada lingkungan permukiman yang sehat.

1. 2 Rumusan Masalah

Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman tidak terbatas pada rumah tempat tinggal yang harus permanen, namun yang lebih penting adalah memenuhi persyaratan kesehatan, dimana kondisi rumah bersih, tertata rapi, berbahan baku kuat, memiliki sarana/ prasarana lingkungan yang memadai (ventilasi, saluran pembuangan sampah/ SPAL, ruang fungsional), kondisi lingkungan sekitar rumah yang sehat dan sebagainya. Selain itu, sikap masyarakat harus dapat memahami arti pentingnya berperilaku hidup sehat dan memelihara lingkungan permukiman yang sehat, serta bagaimana menyikapi permasalahan yang timbul dalam lingkungan komunitas sosial. Hal ini tentunya dilandasi oleh pengetahuan dan kesadaran, sedangkan peningkatan pengetahuan dilandasi oleh meningkatnya pendidikan baik formal maupun non formal.

Program-program pemerintah sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Batu Sembilan, khususnya di bidang kesehatan masyarakat dan lingkungan, seperti: program pembinaan Posyandu, program PKK, program Peningkatan Gizi Keluarga, program Peningkatan Sarana/ Prasarana (infrastruktur), program Reboisasi dan Reklamasi (khususnya pada lahan-lahan bekas galian tambang bauksit, misalnya: kawasan Bukit Carang), program pengadaan Perumahan Rakyat dan sebagainya, namun hal ini tak akan berhasil tanpa adanya partisipasi masyarakat itu sendiri. Namun demikian, partisipasi masyarakat sangat tergantung kepada persepsi, sedangkan persepsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka dalam menilai suatu fenomena, dan pada akhirnya pemahaman ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa apabila tingkat pendidikan masyarakat itu baik (tinggi) maka partisipasi masyarakat tersebut juga akan baik/ tinggi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya perhatian masyarakat akan menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan permukiman. Untuk itu pertanyaan penelitian (*Research Question*) yang diajukan adalah:

"Bagaimanakah penilaian masyarakat tentang partisipasi dalam kegiatan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur?"

1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penilaian partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan permukiman di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan penelitian seperti disebutkan diatas, maka sasaran penelitian adalah:

- a. Mengidentifikasi karakteristik responden di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- b. Mengidentifikasi organisasi yang dibentuk oleh masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur, khususnya yang berkaitan dengan upaya perbaikan dan pemeliharaan permukiman.
- c. Mengidentifikasi penilaian masyarakat tentang partisipasi dalam perbaikan dan pemeliharaan permukiman di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- d. Menganalisa partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan permukiman di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur.
- e. Kesimpulan dan rekomendasi.

1.3.3 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi penetapan kebijakan perbaikan lingkungan permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin, dengan mempertimbangkan persepsi dan preferensi masyarakat agar kebijakan yang diimplementasikan dapat diwujudkan secara optimal.
- b. Penelitian ini merupakan wahana pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup, khususnya yang berkaitan dengan penanganan peningkatan sikap dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan permukiman.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Dalam lingkup materi ini adalah untuk memperjelas dan mempersempit permasalahan yang dibahas, sehingga penulis merasa perlu untuk membatasi agar tidak menjadi bias dari tujuan semula, yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat tentang perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman

Partisipasi masyarakat adalah partisipasi yang berdasarkan penilaian masyarakat terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari di lingkungannya, khususnya yang berkaitan dengan usaha perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman, yang dapat dikategorikan dari penilaian yang rendah, sedang dan penilaian yang tinggi, yaitu mencakup keanggotaan seseorang

dalam organisasi atau kelompok kegiatan masyarakat, intensitas kehadiran seseorang dalam berbagai pertemuan masyarakat dan intensitas seseorang dalam memberikan sumbangan dana atau keuangan bagi kepentingan bersama.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan permukiman, yaitu mencakup sikap sosial dan program pemerintah.
- c. Perbaikan dan pemeliharaan permukiman.

Adalah segala upaya yang dilakukan masyarakat dalam memperbaiki dan memelihara permukiman yang lebih baik, yang mencakup: perbaikan dan pemeliharaan terhadap lingkungan permukiman; kebersihan lingkungan, kebersihan rumah tempat tinggal (hunian); penyediaan/perbaikan dan pemeliharaan sarana/ prasarana lingkungan yang memadai.

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur, khususnya di kawasan-kawasan yang dinilai sangat kurang dalam memperhatikan lingkungan permukiman yang sehat, yaitu di Kp. Sidorejo dan Kp. Bangunrejo. Kelurahan Batu Sembilan merupakan salah satu dari 5 Kelurahan di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur, dengan luas wilayah 26,4 ha. Jumlah penduduk Kelurahan Batu Sembilan pada tahun 2004 mencapai 8.219 jiwa yang tersebar di 4 Dusun, 8 RW dan 21 RT, di wilayah Kelurahan Batu Sembilan merupakan kawasan pengembangan Kota Tanjungpinang. Peta situasi kawasan Kelurahan Batu Sembilan dapat dilihat sebagai berikut:

1.5 Kerangka Pemikiran

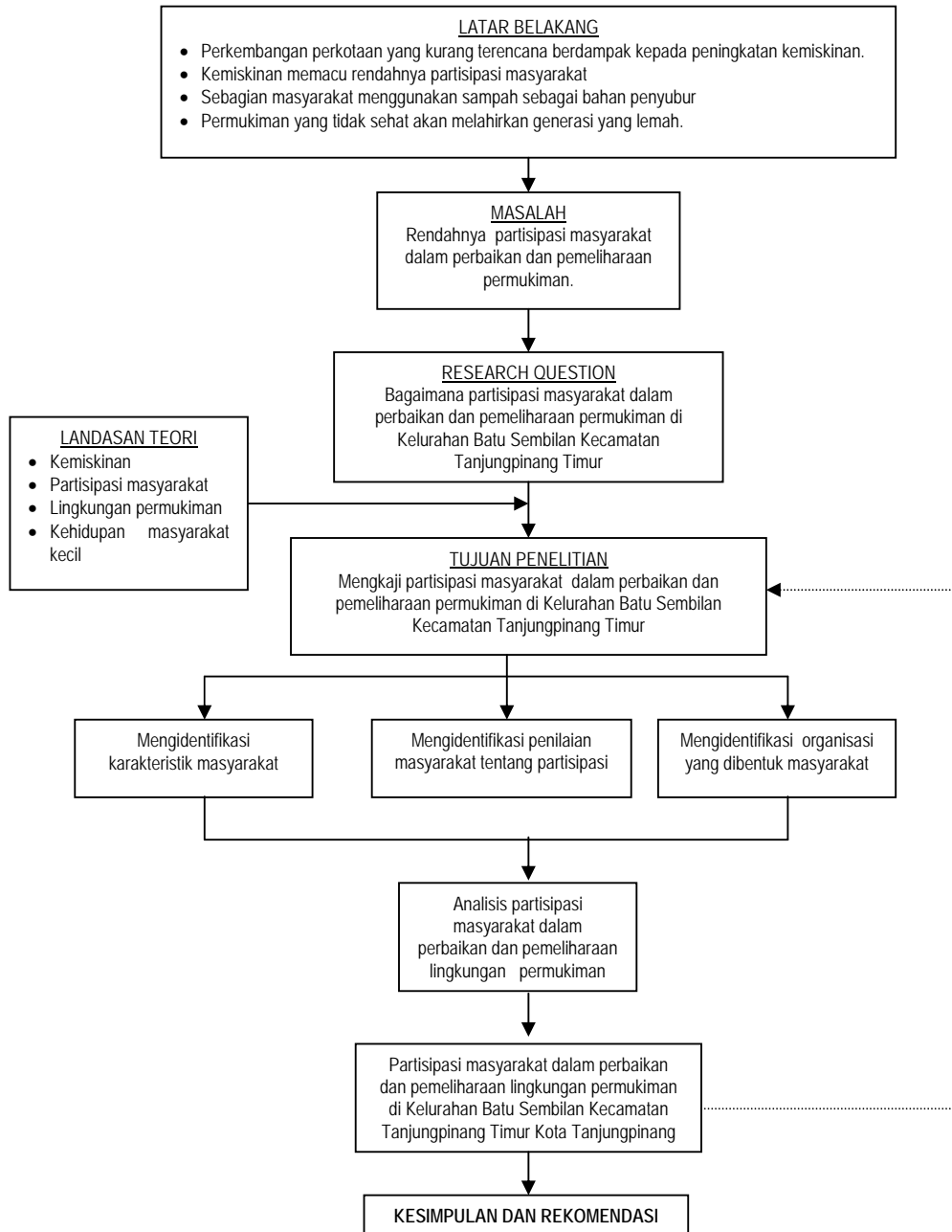
Penataan suatu kawasan permukiman adalah bagian dari suatu perencanaan kota. Dari pengalaman masa lalu terdapat evolusi dalam pemikiran dan praktek yang dibangun berdasarkan suatu tuntutan sederhana maka orang harus dapat merencanakan kota. Dari evolusi ini timbullah sejumlah pelajaran, pengalaman, tradisi dan kecenderungan. Khusus mengenai kecenderungan harus dipahami bahwa sebagian besar apa yang akan kita lakukan dalam perencanaan kota berasal dari apa yang telah kita lakukan. Bahkan mereka yang menganjurkan untuk meninggalkan yang lampau dan menemukan cara-cara yang baru untuk merencanakan kota akan setuju bahwa perubahan seperti itu harus didasarkan atas analisis dan pengertian historis karena mengabaikan pengalaman-pengalaman pendahulu kita hanya akan mengakibatkan terulangnya kembali kesalahan-kesalahan masa lalu (Catanese, 1996: 3).

Sejalan dengan teori tersebut, maka pelaksanaan studi ini menggunakan pendekatan dengan beberapa bagian/ tahapan yang kesemuanya merupakan serangkaian kegiatan yang saling menunjang. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi latar belakang permasalahan yang ada, identifikasi dan informasi, analisis dan evaluasi kemudian kesimpulan.

Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah adanya berbagai permasalahan perkotaan, khususnya di kota-kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi dengan implikasi masalah sanitasi. Kegiatan pengumpulan informasi dan identifikasi terhadap sistem yang dibangun dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat dimaksudkan untuk melihat peningkatan partisipasi masyarakat

dalam rangka perbaikan lingkungan permukiman. Kajian teori dan berbagai masukan akan digunakan dalam proses menganalisis data dan permasalahan.

Pendekatan yang diambil dalam rangka penyusunan studi ini digambarkan di dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



GAMBAR 1.5
SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN

1. 6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Studi

Pendekatan studi yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi empirik yang ditemukan di lapangan yang menggambarkan suatu fenomena yang mempunyai keterkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman pada umumnya, serta kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan.

Pendekatan terhadap kondisi di lapangan (kasus) yang ada menekankan pada kajian terhadap penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam memperbaiki dan memelihara lingkungan permukiman, sedangkan terhadap karakteristik permukiman tersebut menekankan pada kondisi fisik perumahan, lahan pekarangan, serta sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka secara garis besar dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, meliputi:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diperlukan dalam kegiatan penelitian sehingga nantinya dapat diperoleh hasil serta data-data yang lengkap dan akurat mengenai penilaian masyarakat tentang partisipasi dalam pemeliharaan dan perbaikan lingkungan.

Tahap persiapan ini meliputi:

1. Perumusan Masalah

Penentuan masalah untuk penelitian ini didasarkan pada kondisi serta *trend* yang ada pada saat ini, dan permasalahan tersebut memerlukan

upaya pemecahan yang lebih lanjut khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat kota serta kebijakan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka kecenderungan masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman dipilih sebagai permasalahan studi.

2. Perumusan Tujuan

Perumusan tujuan diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman di Kelurahan Batu Sembilan.

3. Studi Literatur

Studi literatur menjadi salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena melalui hal ini dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan dan upaya penyelesaiannya secara teoritis yang diperoleh melalui buku, jurnal, makalah penelitian, dan lain-lainnya, sehingga dapat dijadikan dasar maupun pertimbangan dalam melakukan analisis selanjutnya. Dalam studi ini literatur yang diperlukan khususnya mengenai konsep dasar partisipasi masyarakat, kemiskinan dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat.

4. Penentuan Kebutuhan Data

Untuk mempermudah pelaksanaan survei serta analisis yang akan dilakukan, diperlukan inventarisasi kebutuhan data maupun informasi yang mendukung penelitian.

5. Survei Awal

Melalui survei awal diharapkan dapat diperoleh gambaran umum kawasan studi yang berupa karakteristik maupun permasalahan yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Survei ini dapat dilakukan secara formal maupun informal.

6. Perumusan Rencana Pelaksanaan Survei

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah diperoleh hasil survei awal yang sifatnya sementara, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melengkapi data maupun informasi yang masih kurang, baik melalui observasi lapangan, wawancara kepada beberapa responden yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan yang diambil.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang akan diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data ini terbagi atas pengumpulan data primer dan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan (pengamatan langsung), yaitu terkait dengan karakteristik maupun kondisi permukiman serta lingkungan masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan.

Hasil pengamatan ini dapat berupa foto maupun bentuk catatan lapangan. Selain itu dapat juga berupa kuesioner kepada para responden tentang penilaiannya mengenai partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman di Kelurahan Batu Sembilan serta informasi mengenai karakteristik permukiman tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari instansi terkait, antara lain:

- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang (berkaitan dengan masalah/ data proyek kebersihan lingkungan permukiman).
- Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang (berkaitan dengan masalah/ data proyek/ program penyediaan sarana/ prasarana lingkungan permukiman).
- Dinas Pertanian Kota Tanjungpinang (berkaitan dengan masalah/ data petani/ masyarakat yang memperoleh penyuluhan pertanian, khususnya dalam pengolahan sampah menjadi kompos/ pemeliharaan lingkungan hidup).
- Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial (berkaitan dengan masalah/ data ketenaga kerjaan, kemiskinan dan kelembagaan/ organisasi sosial/ paguyuban masyarakat lokal).
- Kantor Kelurahan Batu Sembilan (berkaitan dengan masalah/ data penduduk dan komposisinya).

Untuk lebih jelasnya, mengenai variabel-variabel analisis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL I.1
VARIABEL ANALISIS

NO	SASARAN	VARIABEL	SUMBER DATA					
			Primer			Sekunder		
			W	Q	O	I	L	S
1.	Identifikasi organisasi yang dibentuk masyarakat	-Bentuk organisasi	√	√				
		-Aktivitas organisasi	√	√				
2.	Identifikasi karakteristik masyarakat	-Mata pencaharian	√	√				
		-Pendidikan	√	√				
		-Kesehatan	√	√				
2.	Identifikasi penilaian masyarakat tentang partisipasi	-Keanggotaan dalam organisasi/ kegiatan masyarakat		√			√	
		-Intensitas kehadiran dalam pertemuan		√			√	
		-Intensitas memberi sum-bangan		√			√	
3.	Identifikasi kegiatan perbaikan lingkungan permukiman	-Perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal	√		√		√	
		-Perbaikan dan pemeliharaan sarana permukiman	√		√		√	
		-Perbaikan dan pemeliharaan prasarana permukiman	√		√		√	
4.	Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat	-Sikap sosial		√				
		-Program pemerintah		√		√		

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Keterangan:

W = Wawancara I = Informasi S = Studi Dokumentasi
Q = Questionaire L = Literatur O = Observasi

c. Teknik Analisis

Analisis yang akan dilakukan dalam studi ini meliputi analisis kualitatif deskriptif.

Analisis Kualitatif Deskriptif

Merupakan analisis yang berupa kajian terhadap hasil partisipasi masyarakat, faktor-faktor pengaruh serta dampaknya terhadap perbaikan lingkungan permukiman.

Adapun variabel yang mendasari penilaian tersebut terdiri atas:

1. Bentuk organisasi
2. Aktivitas organisasi
3. Keanggotaan dalam organisasi
4. Intensitas kehadiran dalam pertemuan
5. Intensitas memberi sumbangan
6. Perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal
7. Perbaikan dan pemeliharaan sarana
8. Perbaikann dan pemeliharaan prasarana
9. Sikap sosial
10. Program pemerintah

Sedangkan di dalam suatu variabel, nilai dari masing-masing kriteria dapat berlainan tergantung pada jumlah unsur untuk masing-masing variabel.

Adapun dari tiap variabel dijelaskan sebagai berikut:

1. Bentuk organisasi

Variabel bentuk organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang mencerminkan adanya partisipasi masyarakat setempat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka, yaitu perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman. Kriteria dari bentuk organisasi adalah:

- a. Organisasi yang bersifat profit
- b. Organisasi yang bersifat non profit

c. Organisasi informal

2. Aktivitas organisasi

Aktivitas organisasi mencerminkan adanya partisipasi masyarakat yang berupaya untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi secara bersama-sama atau untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman. Dalam hal ini aktivitas organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria, yaitu:

a. Aktivitas di bidang ekonomi

b. Aktivitas di bidang sosial.

c. Aktivitas di bidang seni budaya.

3. Keanggotaan dalam organisasi/ kegiatan masyarakat

Variabel keanggotaan dalam organisasi/kegiatan masyarakat merupakan penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah mengatasi masalah lingkungan permukiman, dan memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi kehidupan/ kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kriteria dari variabel keanggotaan dalam organisasi/ kegiatan masyarakat terdiri atas:

a. Menjadi anggota atas kesadaran sendiri

b. Menjadi anggota karena terpaksa

c. Tidak tahu alasannya (ikut-ikutan).

4. Intensitas kehadiran dalam pertemuan

Intensitas kehadiran dalam pertemuan dipengaruhi oleh adanya kesadaran akan partisipasi dan perbaikan lingkungan serta alasan yang bersifat profit (menguntungkan). Adapun kriterianya meliputi:

- a. Selalu (hadir lebih dari 75%).
- b. Sering (hadir antara 50%-75%).
- c. Kadang-kadang (hadir kurang dari 50%).

5. Intensitas memberi sumbangan

Intensitas memberi sumbangan merupakan cerminan dari wujud partisipasi, kepedulian akan hakekat masalah dan untuk membiayai maupun untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman yang sehat dan kondisi kehidupan yang sejahtera. Sedangkan kriterianya meliputi:

- a. Sumbangan pemikiran.
- b. Sumbangan uang/ materi.
- c. Sumbangan tenaga.

6. Perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal

Variabel perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal merupakan penilaian yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal yang sehat tidak terlepas dari penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat untuk perbaikan lingkungan. Adapun kriteria dari variabel ini adalah:

- a. Swadaya.
- b. Bantuan warga sekitar.

c. Bantuan pemerintah.

7. Perbaikan dan pemeliharaan sarana pemukiman.

Variabel perbaikan dan pemeliharaan sarana permukiman seperti tempat peribadatan, lapangan olahraga, balai pertemuan, dan tempat bermain merupakan penilaian yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perbaikan sarana yang bersih dan terawat tidak terlepas dari penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat bersama pemerintah untuk perbaikan lingkungan. Adapun kriteria dari variabel ini adalah:

- a. Rutin (setiap Jumat).
- b. Berkala (tiap 3 bulan sekali).
- c. Tidak terencana (insidental).

8. Perbaikan dan pemeliharaan prasarana permukiman.

Variabel perbaikan dan pemeliharaan sarana/ prasarana permukiman seperti drainase, bak sampah dan jalan lingkungan merupakan penilaian yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perbaikan drainase, sanitasi dan jalan lingkungan yang bersih tidak terlepas dari penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat bersama pemerintah untuk perbaikan lingkungan. Adapun kriteria dari variabel ini adalah:

- a. Rutin (setiap Jumat).
- b. Berkala (tiap 3 bulan sekali).
- c. Tidak terencana (insidental).

9. Sikap Sosial.

Keanggotaan dalam organisasi kegiatan masyarakat juga dipengaruhi oleh kesadaran akan hakekat masalah dan kemudian menumbuhkan sikap untuk berbuat sesuatu, untuk kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan untuk mengatasi masalah perbaikan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, kriteria dalam variabel ini terdiri atas:

- a. Sangat mendukung upaya perbaikan lingkungan.
- b. Cukup mendukung upaya perbaikan lingkungan.
- c. Kurang mendukung upaya perbaikan lingkungan.

10. Program pemerintah

Program pemerintah dalam mengatasi masalah perbaikan lingkungan permukiman sangat diperlukan oleh masyarakat, guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dan mampu memberikan manfaat atau keuntungan yang besar bagi masyarakat. Dalam hal ini program pemerintah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Sangat berorientasi kepada kebutuhan masyarakat lokal
- b. Cukup berorientasi kepada kebutuhan masyarakat lokal
- c. Kurang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat lokal.

TABEL I.2
VARIABEL YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN

NO	VARIABEL	KRITERIA
1.	Bentuk organisasi	- Organisasi profit - Organisasi non profit - Organisasi informal
2.	Aktivitas organisasi	- Aktivitas di bidang ekonomi - Aktivitas di bidang sosial - Aktivitas di bidang seni budaya
3.	Keanggotaan dalam organisasi/ kegiatan masyarakat	- Menjadi anggota atas kesadaran sendiri - Menjadi anggota karena terpaksa

NO	VARIABEL	KRITERIA
		- Tidak tahu alasannya (ikut-ikutan)
4.	Intensitas kehadiran dalam pertemuan	- Selalu (Hadir lebih dari 75%) - Sering (Hadir antara 50% – 75%). - Kadang-kadang (Hadir kurang dari 50%).
5.	Intensitas memberi sumbangan	- Sumbangan pemikiran - Sumbangan uang/materi. - Sumbangan tenaga.
6.	Perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal	- Swadaya - Bantuan warga sekitar - Bantuan pemerintah
7.	Perbaikan dan pemeliharaan sarana lingkungan permukiman	- Rutin - Berkala - Insidental
8.	Perbaikan dan pemeliharaan prasarana lingkungan permukiman	- Rutin - Berkala - Insidental
9.	Sikap Sosial	- Sangat mendukung - Cukup mendukung - Kurang mendukung
10.	Program pemerintah	- Sangat berorientasi kebutuhan lokal - Cukup berorientasi kebutuhan lokal - Kurang berorientasi kebutuhan lokal

Sumber: Hasil Analisis, 2005.

Adapun untuk pengukuran secara umum terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1.6.2 Metode Deskriptif

Metode ini merupakan metode kualitatif yang digunakan untuk melakukan kajian terhadap partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan sesuai hasil yang diperoleh melalui beberapa analisis sebelumnya, yakni penilaian masyarakat tentang partisipasi, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman. Melalui metode ini diharapkan dapat diambil suatu kesimpulan yang berupa temuan studi yang pada akhirnya dapat dijadikan dasar dalam perumusan rekomendasi.

1.6.3 Unit Analisis, Populasi, Sampel dan Responden

a. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah keseluruhan individu masyarakat serta aparat pemerintah dan tokoh masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur.

b. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat 8.219 orang, sedangkan aparat pemerintah kecamatan/kelurahan dan tokoh masyarakat di wilayah kelurahan Batu Sembilan yang berjumlah 22 orang.

c. Sampel

1) Sampel aparat dan tokoh masyarakat.

Teknik sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, yaitu seluruh populasi sekaligus dijadikan sampel.

2) Sampel masyarakat.

Untuk menetapkan ukuran sampel warga masyarakat digunakan rumus Frank Lynch (A. Taufik, 1987:199) sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2 p (1 - p)}{N \cdot d^2 + Z^2 p (1 - p)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

Z = Nilai normal variabel (1,96), untuk penilaian masyarakat tentang kepercayaan (0,95)

p = Harga patokan terbatas (0,50)

d = Sampel error (0.10)

Berdasarkan rumus tersebut, maka akan diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{8.219 (1,96)^2 \cdot 0,5 (1 - 0,5)}{8.219 (0,10)^2 + (0,95)^2 \cdot (0,5) \cdot (1 - 0,5)} \\
 &= \frac{8.219 (3.84) \cdot 0,5 (0,5)}{8,219 (0.01) + (0.9) \cdot (0,5) \cdot (0,5)} \\
 &= \frac{8.219 \cdot (3.84) \cdot 0.3}{82.19 + 0.2} \\
 &= \frac{9468.29}{82.39} \\
 &= 114.9204 \text{ dibulatkan} = 115
 \end{aligned}$$

d. Responden

- 1) Untuk aparat/ tokoh masyarakat, seluruh populasi dijadikan responden, yaitu 22 orang.
- 2) Untuk masyarakat respondennya adalah sebanyak 115 orang.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang menguraikan:

- BAB I PENDAHULUAN, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, sasaran dan kegunaan penelitian, ruang lingkup materi, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.
- BAB II KAJIAN LITERATUR PARTISIPASI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN, yang menjelaskan tentang teori-teori yang dipergunakan yang relevan dengan ruang lingkup masalah penelitian.

- BAB III GAMBARAN LOKASI KAWASAN KELURAHAN BATU SEMBILAN, dalam bab ini dijelaskan mengenai kondisi umum lokasi penelitian yang bermula dari struktur ruang kawasan terhadap kota Tanjungpinang, pemaparan wilayah Kecamatan, kemudian wilayah Kelurahan Batu Sembilan.
- BAB IV ANALISIS TERHADAP PENILAIAN MASYARAKAT DALAM PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN, dalam bab ini dipaparkan mengenai hasil-hasil analisis partisipasi, faktor pendukung, perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman di Kelurahan Batu Sembilan.
- BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, yang menguraikan tentang kesimpulan dari analisi yang telah dilakukan serta adanya rekomendasi untuk pemerintah di Kelurahan Batu Sembilan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN LITERATUR PARTISIPASI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

2.1 Partisipasi

Definisi partisipasi dalam pembahasan ini diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah sedangkan masyarakat mengambil sebagian kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dan masyarakat mendapatkan manfaat atau keuntungan dari pembangunan tersebut.

Menurut Jennifer-Mc Cracken-Deepa (1998: 126) menjelaskan bahwa Partisipasi merupakan proses dimana pihak-pihak yang terlibat mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan, keputusan dan sumber-sumber yang mempengaruhi mereka. Partisipasi memiliki sisi yang berbeda, bermula dari pemberian informasi dan metode konsultasi sampai dengan mekanisme untuk berkolaborasi dan pemberdayaan yang memberi peluang bagi stakeholder untuk lebih memiliki pengaruh dan kendali.

Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang.

Pengertian partisipasi menurut Sutarto (1980: 125) adalah turut sertanya seseorang baik secara langsung maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai

persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan akan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Pengertian diatas menekankan pada keikut sertaan seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Bentuk partisipasi yang merupakan keikut sertaan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan setidaknya terdapat dua tipe partisipasi Koentjaraningrat (1980: 79) menyatakan bahwa:

- 1. Partisipasi dalam aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan.**
- 2. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam pembangunan.**

Bentuk partisipasi lain yang lebih lengkap dikemukakan oleh Bryan dan White dalam Ndraha (1983: 17) dimana disamping ada partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan juga terdapat partisipasi untuk pemanfaatan suatu proyek.

Selain pendapat tersebut diatas, Simanjuntak (1982: 56) mengemukakan pendapat bahwa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat perlu adanya klasifikasi dari partisipasi tersebut. Selanjutnya dikatakan Bryan dan White dalam Ndraha (1983: 23) bahwa partisipasi dapat berbentuk:

- a. Partisipasi buah pikiran.**
- b. Partisipasi harta dan uang.**
- c. Partisipasi tenaga atau gotong-royong.**
- d. Partisipasi sosial.**
- e. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten.**

Jadi partisipasi adalah juga berfungsi dari manfaat disamping pengorbanan ataupun resiko. Tiga pengertian partisipasi diatas dapat dibangun dan diurutkan menjadi tahap-tahap terjadinya suatu partisipasi. Pada tahap pertama partisipasi merupakan proses yang dilakukan pada penilaian masyarakat tentang pengambilan keputusan. Tahap ini dalam proses pembangunan di kelurahan adalah identik dengan proses perencanaan untuk menentukan program-program dan proyek-proyek apakah yang akan dibangun.

Tahap kedua partisipasi adalah keikutsertaan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Tahap ini dalam pembangunan adalah implementasi dari program-program dan proyek-proyek yang telah disetujui atau diputuskan dalam tahap pengambilan keputusan. Tahap pelaksanaan ini dapat berupa keikutsertaan secara fisik seperti pemberian tenaga maupun pemberian sumbangan uang dan bahan-bahan material untuk pembangunan.

Tahap ketiga partisipasi adalah tahap pemanfaatan yakni tahap dimana masyarakat memperoleh hasil-hasil dari program dan proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Tahap penerimaan hasil ini merupakan perwujudan dalam partisipasi. Oleh sebab itu, pada tahap penerimaan hasil akan diikuti oleh tumbuhnya tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga agar proyek-proyek pembangunan yang dirasakan

memberikan manfaat tersebut dapat dinikmati secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan tahap-tahap partisipasi diatas maka dapat dirumuskan pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam pembangunan secara sadar baik dalam tahap perencanaan, implementasi dan pemanfaatan dalam menerima hasil-hasil pembangunan.

Berbicara masalah partisipasi, berarti akan selalu berkait dengan upaya-upaya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas yang telah direncanakan. Keikutsertaan secara aktif tersebut merupakan energi yang mendorong Bergeraknya roda pembangunan atau kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan atau untuk memecahkan suatu masalah.

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat, baik secara perorangan, kelompok atau kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun diluar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab, demikian antara lain yang dijelaskan Soelaiman (1985: 6). Secara konseptual partisipasi masyarakat merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat, dengan demikian ia berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial.

Pendapat lainnya tentang partisipasi masyarakat, dikemukakan oleh Cary dalam Iskandar (1994: 75) bahwa tekanan utama partisipasi warga masyarakat adalah pada kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan

dan masalah-masalah bersama, yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri. Partisipasi tidak lain adalah hasil dari konsensus sosial warga masyarakat akan arah perubahan sosial yang mereka harapkan.

Dengan demikian partisipasi masyarakat tidak lain merupakan peningkatan mutu dari gotong-royong tradisional yang berdasarkan spontanitas, kesuka-relaan dan bersifat insidental, kepada suatu usaha perencanaan yang memerlukan perumusan tujuan, penentuan langkah-langkah dan cara kerja untuk mencapai tujuan. Proses ini jelas memerlukan pemikiran dan keputusan yang rasional. Pimpinan dan orang-orang yang dipimpinya harus pula peka atau tanggap terhadap aspirasi kebutuhan dan pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat, sehingga perumusan rasional tadi pada hakekatnya merupakan penjabaran dari apa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Stuart Chapin, Faisal K. dan Joseph F. Stepanek dalam Iskandar (1994: 79) mencatat ada lima aspek yang terkait dengan tipe-tipe partisipasi masyarakat, yaitu dari penilaian masyarakat tentangan yang rendah hingga ke penilaian masyarakat tentangan yang tertinggi, yaitu sebagai berikut:

- Keanggotaan seseorang dalam organisasi atau kelompok kegiatan masyarakat.
- Intensitas kehadiran seseorang dalam berbagai pertemuan masyarakat.
- Intensitas seseorang dalam memberikan sumbangan dana atau keuangan bagi kepentingan bersama.

- Keanggotaan seseorang dalam berbagai kepanitiaan yang dibentuk dalam masyarakat.
- Posisi kepemimpinan seseorang dalam berbagai organisasi/ kelompok kegiatan.

Berdasarkan pendapat tersebut, nampaknya partisipasi lebih dititikberatkan kepada aktivitas seseorang dalam suatu organisasi sebagai pencerminan daripada partisipasi. Sedangkan menurut Rozen Berg dalam Tjokrowinoto (1984: 24), partisipasi merupakan "keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pikirannya bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggungjawab terhadap organisasi tersebut".

Partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat dinyatakan dalam bentuk pemikiran, keterampilan/ keahlian, tenaga, harta benda atau uang (Keith Davis dalam Santoso, 1988: 16). Sejalan dengan itu, Surbakti (1984: 72-73) mengemukakan bahwa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai partisipasi antara lain: (1) Ikut mengajukan usul-usul mengenai suatu kegiatan; (2) Ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang alternative program yang dianggap paling baik; (3) Ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan termasuk disini memberi iuran atau sumbangan materiil; (4) Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan.

Dengan demikian, ukuran peran serta masyarakat lebih tepat bila dijelaskan secara kualitatif. Dalam hal ini partisipasi dapat didefinisikan ke dalam

sebuah tipologi yang memperlihatkan adanya perbedaan penilaian masyarakat tentang intensitas keterlibatan masyarakat (Whyte dalam Bourne, 1984: 222). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyerahan tanggungjawab dapat dibedakan menjadi (Hamdee dan Goethert, 1997: 66):

1. Tidak ada sama sekali (*none*): outsider semata-mata bertanggungjawab pada semua pihak, dengan tanpa keterlibatan masyarakat.
2. Tidak langsung (*indirect*): sama dengan tidak ada partisipasi tetapi informasi merupakan sesuatu yang spesifik.
3. Konsultatif (*consultative*): outsider mendasarkan atas informasi dengan tidak langsung diperoleh dari masyarakat.
4. Terbagi (*shared*): masyarakat dan outsider berinteraksi sejauh mungkin secara bersamaan.
5. Pengendalian penuh (*full control*): masyarakat mendominasi dan outsider membantu ketika diperlukan.

Penilaian masyarakat tentang partisipasi dimana masyarakat memegang kendali merupakan tujuan ideal. Kualitas keterlibatan ditunjukkan oleh manfaat kegiatan yang diambil dalam kerangka kegiatan keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pengertian partisipasi yang mengandung makna pengambilalihan sebagian kegiatan. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak skala dan jumlah kegiatan yang diambil alih, semakin tinggi partisipasi masyarakat. Dalam lingkup wilayah, semakin banyak individu berpartisipasi, maka semakin tinggi pula partisipasi dalam wilayah tersebut.

Dalam hubungannya dengan pembangunan, khususnya pembangunan di kelurahan, hal ini berarti keterlibatan mental, emosional, energi seseorang yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir, perasaan dan lainnya bagi tercapainya tujuan secara bersama-sama dengan penuh tanggungjawab terhadap kelurahan dimana mereka tinggal. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dapat dilihat dalam hal sejauh mana partisipasi, prakarsa dan swadaya masyarakat yang bersangkutan telah berhasil dipenilaian masyarakat tentangan dan dibina, disamping hal-hal fisik dari padanya yang diharapkan.

Menurut Arnstein dalam Panudju (1999: 69-76) penilaian masyarakat tentang partisipasi atau peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digolongkan menjadi delapan tipologi penilaian masyarakat tentang. Secara garis besar tipologi penilaian masyarakat tentang partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manipulasi (*manipulation*)

Penilaian masyarakat tentang partisipasi ini adalah yang paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasihat *advising board*. Dalam hal ini tidak ada peranserta masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

b. Penyembuhan (*therapy*)

Dengan berkedok melibatkan peranserta masyarakat dalam perencanaan, para perancang memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan dari mereka.

c. Pemberian Informasi (*informing*)

Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian yang sering terjadi penekanannya lebih pada pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kuasa kepada masyarakat. Tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

d. Konsultasi (*consultation*)

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Akan tetapi cara ini penilaian masyarakat tentang keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dipergunakan adalah survey tentang

arah pikir masyarakat, pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar-pendapat dengan masyarakat.

e. Perujukan (*placation*)

Pada penilaian masyarakat tentang ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota lainnya wakil-wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usul dari masyarakat diperhatikan namun suara masyarakat itu sering tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

f. Kemitraan (*partnership*)

Pada penilaian masyarakat tentang ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggungjawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

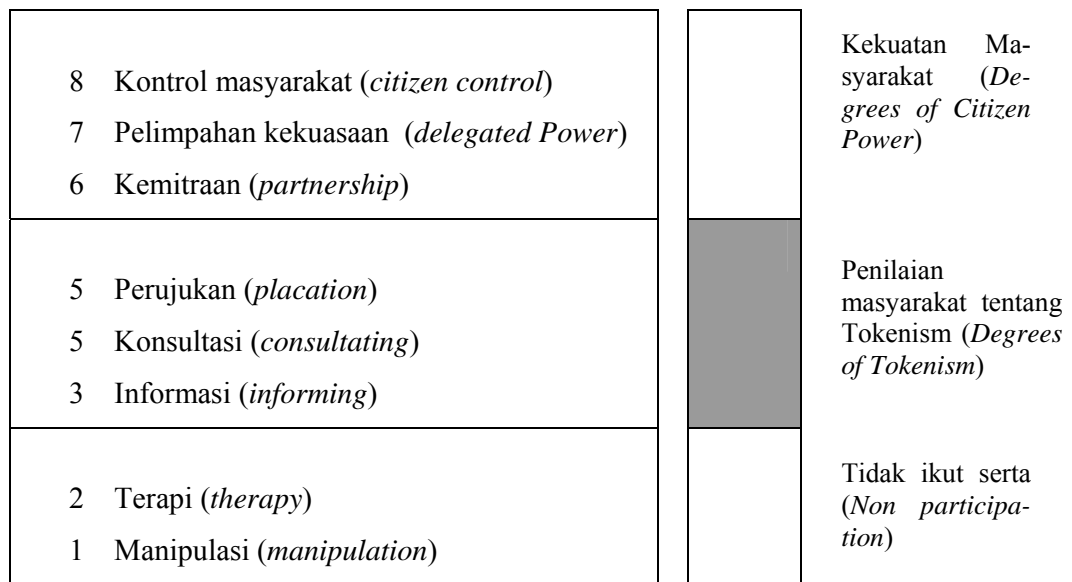
g. Pelimpahan kekuasaan (*delegated power*)

Pada penilaian masyarakat tentang ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan yang dalam

hal ini adalah pemerintah harus mengadakan tawar menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas.

h. Masyarakat yang mengontrol (*citizen control*)

Pada penilaian masyarakat tentang ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana, tanpa melewati pihak ketiga.



Sumber : Panudju (1999)

GAMBAR 2.1
TIPOLOGI PENILAIAN MASYARAKAT TENTANG PARTISIPASI
MASYARAKAT DARI ARNSTEIN

Dari kedelapan tipologi tersebut, menurut Arnstein secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada peranserta atau *non participation* yang meliputi *manipulation* dan *therapy*;
- b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau *degrees of tokenism* yang meliputi *informing*, *consultation* dan *placation*;
- c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau *degrees of citizen power* yang meliputi *partnership*, *delegated power* dan *citizen control*.

Berbeda dengan pendapat terdahulu yang telah dijelaskan, maka secara tegas Bintoro (1989: 207) mengungkapkan bahwa Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah serta keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan juga keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Sedangkan Cohen dan Up Hoff dalam Syamsi (1986: 114) menjelaskan bahwa “Partisipasi itu merupakan keterlibatan nyata orang-orang dalam proses pembuatan keputusan mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Juga dapat diartikan sebagai keterlibatan mereka dalam menikmati hasil serta partisipasi dalam mengadakan evaluasi”. Dengan demikian melalui partisipasi masyarakat benar-benar dilibatkan secara totalitas sejak awal sampai akhir pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat sebagai partisipasi vertikal dan horizontal. Partisipasi vertikal terjadi dalam kondisi tertentu dimana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan mana masyarakat berbeda dalam posisi bawahan pengikut atau klien. Partisipasi horizontal terjadi karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa dimana setiap anggota kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu sama lain dalam usaha bersama, maupun dalam rangka kegiatan dengan pihak lain.

Dari penegasan tersebut memberikan gambaran bahwa dampak partisipasi yang ditumbuhkan dari atas, masyarakat cenderung lebih bersifat pasif, dan jika partisipasi itu bersifat horizontal, maka akan menumbuhkan sifat aktif dan mandiri.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan, sekaligus juga sebagai objek atau sasaran dari pembangunan, bukan saja mereka memberi tetapi juga sebagai pelaksana, penerima hasil dan mereka juga memelihara hasil-hasil pembangunan. Untuk itu keterlibatan warga masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan, sehingga dapat bersama-sama untuk melaksanakan pembangunan.

Namun demikian, persoalan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan seringkali berlangsung tidak efektif. Cukup banyak kendala yang timbul yang seringkali tidak mampu diantisipasi. Soelaiman (1985:15-20) menyebutkan beberapa hambatan atau kendala yang sebenarnya apabila

didayagunakan dengan baik akan menjadi faktor pendukung keberhasilan partisipasi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Sikap sosial yang membudaya seperti paternalistik, feodal, superioritas/dominasi, yang memandang pegawai pemerintah bukan sebagai abdi negara tapi sebagai penguasa/ raja.
- (2) Struktur dan pranata sosial yang berlapis-lapis cenderung mementingkan kesadaran akan kelasnya saja, tetapi kurang menghargai kelas atau kelompok lain.
- (3) Adanya sikap ketergantungan dan pasrah kepada nasib sebelum berusaha keras.
- (4) Kekecewaan yang mendalam pada masyarakat akibat adanya kesenjangan.
- (5) Kemiskinan atau penghasilan rendah, sehingga waktu dan tenaga tercurah habis untuk mencari nafkah.
- (6) Mobilisasi penduduk yang tinggi, terutama adanya urbanisasi.
- (7) Program-program yang tidak berorientasi pada kebutuhan lokal.

Berdasarkan pendapat tersebut, sebenarnya persoalan pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat dipenilaian masyarakat tentangkan, manakala pimpinan organisasi beserta pengurusnya mampu membatasi atau mengurangi dan bahkan meniadakan hambatan-hambatan yang telah disebutkan diatas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya penggerakan di segala aspek/bidang, baik itu keorganisasian, personil, anggaran, dan sumber-sumber serta bidang materiilnya (sarana prasarana penunjang), sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Sedangkan menurut Midgley (1986: 113-117) menyimpulkan terdapat empat pelaku yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat, yakni: pemerintah, pelaksana, fasilitator dan masyarakat itu sendiri.

Secara umum partisipasi seseorang, sekelompok orang atau masyarakat mengandung maksud penyerahan sebagian peran dalam kegiatan dan tanggung jawab tertentu dari satu pihak kepada pihak yang lain (Ramos dalam Yeung dan McGee, 1986: 32). Jadi partisipasi memerlukan kesediaan kedua belah pihak dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan.

Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam berpartisipasi:

- a. Hasil dari keterlibatan, artinya dalam berpartisipasi seseorang tidak akan antusias dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kegiatan jika dia merasa bahwa partisipasi tidak mempunyai akibat bermakna pada hasil akhirnya.
- b. Adanya kepentingan khusus yang berpengaruh secara langsung. Masyarakat akan bersedia berpartisipasi jika individu tersebut merasa terkait (terlibat) dan mendapatkan keuntungan baik sebagai individu maupun kelompok dimana ia menjadi anggotanya sesuai keinginan dan kebutuhan mereka yang dapat dirasakan manfaatnya.

Keinginan masyarakat sebelum terlibat dalam proses partisipasi menurut Dusseldorp (1981: 18) yaitu masyarakat sadar bahwa:

- a. Situasi sekarang ini tidak memuaskan dan dapat atau harus diperbaiki.
- b. Situasi sekarang dapat diubah dan diperbaiki melalui kegiatan manusia.
- c. Masyarakat merasa dapat dan harus berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

d. Masyarakat dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat, dan ada rasa percaya diri.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat tergantung pada kemauan individu yang meliputi tiga hal (PY. Chinchankar, 1984: 44), yaitu: a) Mau membantu keuangan dari sumber sendiri, dalam bentuk tunai atau barang, b) Mau berbagi resiko dan tanggung jawab, c) Mau mengelola kekuatan dari sumber-sumber yang ada dengan persetujuan bersama.

Keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan kaitannya dengan partisipasi, menurut Dusseldorp (1981: 24) terdapat dua bentuk partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, yakni: a) Partisipasi bebas dan b) Partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara sukarela didalam suatu kegiatan partisipasi tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi menjadi dua katagori yaitu partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan pada keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain.

Sedangkan partisipasi terbujuk adalah jika seseorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela didalam aktivitas kelompok tertentu. Adapun partisipasi terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara, yaitu partisipasi terpaksa oleh hukum dan terpaksa keadaan sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi didalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan

keyakinan mereka dengan derajat pemaksaan yang berbeda-beda, misalnya anggota masyarakat wajib memelihara fasilitas sosial dan utilitas umum, hal ini tertuang didalam peraturan/ instruksi menteri dalam negeri. Partisipasi terpaksa karena kondisi ekonomi terjadi bila seseorang yang tidak turut didalam suatu kegiatan akan mendapatkan kesulitan dalam aspek sosial ekonomi, misalnya bila seseorang tidak turut serta dalam pemeliharaan prasarana lingkungan di kampungnya maka ia akan disisihkan dari pergaulan tetangganya.

Jadi secara garis besar untuk mencapai tujuan yang melibatkan partisipasi masyarakat mencakup pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan tindakan (*action*) dari masyarakat itu sendiri.

Partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Karena partisipasi merupakan kerjasama maka dalam definisi ini tidak diasumsikan bahwa subsistem disubordinasikan oleh suprasistem dan subsistem adalah sesuatu yang pasif dari suatu sistem pembangunan. Subsistem dalam konteks partisipasi ini diasumsikan mempunyai aspirasi, nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan. Definisi inilah yang berlaku secara universal tentang partisipasi (Soetrisno, 2004: 207).

Munculnya paradigma pembangunan partisipatoris mengindikasikan adanya dua perspektif: yang pertama, pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa

persepsi setempat, pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Yang kedua adalah membuat umpan balik (*feedback*) yang pada hakikatnya merupakan bagian tak terlepaskan dari kegiatan pembangunan.

Sejalan dengan hal itu, J. Pretty dan Guijt (1992) dalam Britha Mikkelsen (2001) menjelaskan tentang implikasi praktis dari pendekatan partisipatoris, yaitu Pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran, disamping bantuan pembangunan. Ringkasnya, diperlukan suatu paradigma baru.

Perubahan paradigma nampaknya lebih diakibatkan oleh pekerjaan pembangunan dibandingkan oleh penelitian pembangunan. Luasnya kekecewaan atas hasil-hasil yang kurang memuaskan, sekalipun sudah dilakukan upaya yang sungguh-sungguh, telah menyebabkan timbulnya perhatian baru terhadap pembangunan partisipatoris.

Dengan demikian maka pengertian peranserta masyarakat dalam bidang buangan sampah adalah keterlibatan masyarakat dalam arti turut serta bertanggungjawab baik pasif maupun aktif individu, keluarga dan kelompok untuk mewujudkan kesehatan bagi diri sendiri maupun lingkungan.

2.2 Beberapa Pengertian Mengenai Sanitasi Infrastruktur

Beberapa pengertian umum yang berkaitan dengan topik penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Sanitasi infrastruktur adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang terdapat pada infrastruktur dengan cara menghilangkan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang merupakan mata rantai penyebaran penyakit (Ehters dan Steel, 1958)
- b. Definisi sanitasi menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah suatu usaha pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia dan biologi dalam lingkungan hidup manusia, yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan hidup manusia.
- c. Pekerjaan sanitasi adalah pembangunan pasilitas penyediaan air minum, penanganan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman dan perumahan yang sehat.

2.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Program

Dalam implementasi program pembangunan perkotaan mulai menekankan pendekatan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) dengan beberapa ciri, antara lain: demokatis, partisipatif, transparasi dan akuntabilitas.

Dalam kaitan hal tersebut, Budihardjo (2001: 4) mengingatkan bahwa kecuali program-program tersebut tidak kalah pentingnya adalah jaminan rasa aman dan konteks micro pengakuan terhadap keberadaan maupun kegiatan ekonomi orang miskin yang dituding sebagai tak terencana (*unplanned*) dan

semrawut (*chaostic*). Selanjutnya dikatakan sebetulnya yang bisa menjadi ujung tombak penanggulangan kemiskinan perkotaan adalah akses terhadap lahan untuk perumahan dan juga terciptanya rasa aman bertempat tinggal (*security of tenure*), karena kebanyakan lingkungan permukiman mereka yang kumuh, *informal settlements* dan *extra legal*. Lebih jauh ditekankan perlunya peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka, dalam proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, implementasi pemantauan dan evaluasi dalam meningkatkan perilaku, menyerap informasi dan berkomunikasi.

Sementara itu Tjokroamidjojo (1982: 181), mengemukakan sedikitnya ada enam ciri-ciri program yang baik, antara lain: 1) Tujuan harus jelas, 2) Peralatan yang baik untuk mencapainya, 3) Konsisten kebijakan, 4) Pengukuran biaya dan manfaat, 5) Hubungan dengan pembangunan yang lainnya dan 6) Manajemen yang baik.

Disamping ciri-ciri tersebut terdapat pendekatan yang disebut pendekatan kesesuaian (*The Fit Model*) yang dikemukakan oleh Korten dan Alfonso (Soetrisno, 2001: 53) model ini berasumsi bahwa keberhasilan suatu program ditentukan oleh adanya kesesuaian antara tiga komponen yaitu:

1. Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi, artinya artikulasi kepentingan kelompok sasaran haruslah mendapat saluran didalam proses pengambilan keputusan organisasi.
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi, dalam arti persyaratan tugas yang dituntut program harus sesuai dengan kompetensi personil organisasi.

3. Kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran, ini berarti bahwa output suatu program harus sesuai dengan *felt need* kelompok sasaran.

Pengertian terhadap tujuh dimensi tersebut sangat berguna untuk mengamati arah dan kebersihan program yang direncanakan. Khususnya mengenai dimensi partisipasi lebih jauh dapat dipahami bahwa menurut Davis (Sastrosaputro, 1986: 13) dalam bukunya *Human Relations at Work*, mengemukakan partisipasi sebagai keterlibatan mental/ pikiran dan emosi/ perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Dari definisi tersebut ada tiga hal penting, yaitu: 1) keterlibatan mental dan emosi, jadi bukan sekedar jasmani, 2) kesediaan untuk memberikan sumbangan, jadi ada rasa sukarela, dan 3) tanggung jawab, jadi adanya *sense of belongingness*. Dalam kaitannya dengan pembangunan, King (Raharjo, 1983: 94) secara tegas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah.

Sedangkan PBB, seperti dikutip oleh Slamet (1993: 3) memberi definisi bahwa keterlibatan aktif dan bermakna dari masa penduduk pada penilaian masyarakat tentang-penilaian masyarakat tentang yang berbeda (a) didalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut, (b) pelaksanaan program dan proyek-proyek secara suka rela dan (c) pemanfaatan hasil-hasil suatu program atau proyek.

Definisi tersebut memperjelas pengertian partisipasi melalui tingkatan-penilaian masyarakat tentang pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemanfaatan dari hasil program-program pembangunan.

Teori lain mengenai partisipasi, dapat dikemukakan dari Blau, seperti dikutip oleh Ndraha (1990: 105) mengemukakan teori pertukaran (*Exchange Theory*), yaitu bahwa semakin banyak hasil yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Guna memahami tahap-tahap partisipasi disini dikemukakan oleh Ndraha (1990: 103) menyetengahkan enam tahap partisipasi, yaitu (1) Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial, (2) Partisipasi dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi penilaian terhadap informasi baik menerima maupun menolak, (3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan, (4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, (5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, (6) Partisipasi dalam menilai pembangunan sejauh mana kesesuaian dengan rencana.

Lebih ringkas pendapat tersebut dikemukakan oleh Ericson (Slamet, 1993: 89) mengemukakan tiga penilaian masyarakat tentang partisipasi, yaitu: (1) Partisipasi dalam tahap perencanaan (*Idea Planning Stage*), (2) Partisipasi dalam tahap pelaksanaan (*Implementation Stage*) dan (3) Partisipasi di dalam tahap pemanfaatan (*Utilization Stage*).

Di dalam kenyataannya, partisipasi banyak diwujudkan dalam berbagai jenis, Davis (Sastropoetro, 1986: 16) mengemukakan jenis-jenis partisipasi sebagai berikut: a) pikiran (*psychological participation*), b) tenaga (*physical participation*), c) pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*), d) keahlian (*participation with skill*), e) barang (*material participation*) dan f) uang (*money participation*).

Dengan mengetahui berbagai jenis partisipasi tersebut dapat dipahami betapa luasnya peluang yang bisa dipilih oleh masyarakat dalam mewujudkan keterlibatan atau perannya dalam kegiatan bersama tersebut.

Ndraha (1990: 108) mengemukakan sebuah hipotesis yang sangat berguna bagi pemahaman tentang partisipasi yaitu: semakin profesional partisipasi masyarakat semakin besar rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan dan sebaliknya. Partisipasi profesional disini dimaksud adalah partisipasi yang dilakukan sepanjang proses atau tahap-tahap program pembangunan.

Menarik jika dihubungkan dengan pendapat Soedjatmoko (1984: 48) hanya jika masyarakat miskin mengorganisasikan diri secara aktif ikut serta dalam perencanaan dan penggunaan pelayanan akan ada kemungkinan bahwa fasilitas yang tersedia benar-benar digunakan dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Pembinaan peran serta masyarakat dengan pendekatan konseptual, yakni konsepsi pembangunan bertumpu kepada masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut: a) basis komunitas (*community base*) sebagai suatu konsep, b) peran serta (*participation*) sebagai bentuk konkrit dari konsep *community base*, c) kemitraan

sebagai wujud operasional dari peran serta tersebut, d) pemberdayaan diperlukan didalam mendorong proses kemitraan agar berjalan sebagai yang diinginkan pihak-pihak terkait.

Tim expert Bank Dunia yang melakukan penelitian sanitasi di beberapa wilayah yang tertuang di dalam *Journal of Planning and Research* (2000) dengan judul laporan “*Designing a Neighborhood Idea*” for Urbansewers: A Case Study of Indonesia menyatakan bahwa “*We argue that planners must reorient their thinking from city level master planning toward the neighborhood*”.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia strategi pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat telah tumbuh dan berkembang sejak lama dan hampir seluruh daerah, hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat seperti gotong-royong, kerja bakti, gugur gunung dan saling membantu saat mengalami musibah kematian anggota masyarakat dan sebagainya. Hal ini pada umumnya dikoordinasikan oleh lembaga yang ada dilingkungan masyarakat sendiri seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), PKK, Karang Taruna dan lain-lain.

Dengan demikian secara teoritis dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat melalui berbagai tahapan pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan) akan berpengaruh terhadap keberhasilan program. Artinya, semakin tinggi dan semakin proporsional (lengkapnya proses atau tahap yang dilalui) partisipasi masyarakat pada program yang akan dilaksanakan akan semakin tinggi penilaian masyarakat tentang keberhasilan program tersebut. Oleh karena partisipasi yang tinggi akan memunculkan tanggung jawab yang tinggi

pula dan semakin tinggi tanggung jawab serta peran serta masyarakat pada gilirannya akan menentukan keberhasilan program tersebut.

2.4 Permukiman Kumuh Perkotaan

Timbulnya kawasan kumuh diperkotaan tidak lepas dari keadaan kemiskinan kota. Mengenai pengertian kumuh secara ringkas dapat digambarkan sebagai suatu kawasan permukiman yang terdapat bangunan-bangunan berkondisi sub standar yang dihuni warga miskin yang padat, Bergel seperti dikutip Surbakti (1984: 65). Sedangkan menurut World Bank dalam *Slum Upgrading Action Plan* menyatakan *Slum do not have* (Hunian liar tidak memiliki):

- Penyediaan air bersih, sanitasi, sarana pembuangan sampah akhir, lampu jalan, jalan yang dikeraskan, akses untuk memperoleh pelayanan darurat.
- Sekolah dan klinik yang aman bagi anak-anak untuk bermain
- Tempat bagi warga untuk bertemu dan bersosialisasi.

Pengertian hunian liar pada dasarnya terkait status hukum dari pada tempat hunian, termasuk juga legalitas bangunannya, biasanya berwujud sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk miskin sering kali melakukan penyerobotan tanah negara maupun tanah milik pihak lain, sebagai bagian dari *survival strategic* mereka. De Soto (1992) menggambarkan penyerobotan dengan cara menduduki secara berangsur-angsur (*gradual invasion*) maupun dengan menggunakan kekerasan (*violent invasion*).

Mengenai kemiskinan kota, pernah dibahas pada pertemuan internasional di Recife, Brazil tahun 1996 dengan beberapa hasil seperti dikutip oleh Silas (1996: III-6) bahwa kemiskinan merupakan gejala global dan bahwa perkembangan ekonomi global seringkali justru memperparah masalah kemiskinan kota. Kemiskinan kota bersifat paradoksal, bagi miskin merupakan kenyataan sehari-hari tidak dipermasalahkan, tetapi bagi pihak lain dipandang sebagai penyakit, dan salah satu kendala menyelesaikannya adalah sikap ambivalen pihak-pihak terkait.

Untuk memahami kemiskinan perkotaan ada beberapa ciri atau karakteristik yang pada pokoknya meliputi tiga hal yaitu: 1) permukiman kumuh (*slum*), 2) hunian liar (*squatter*) dan 3) ekonomi rumah tangga (*household economic*).

Perumahan merupakan dimensi kemiskinan yang paling nyata (Gilbert dan Gugler, 1996: 107), demikian pula Silas (1999: II-8) menyatakan unsur paling dominan mudah ditangkap dari kondisi miskin adalah sisi hunian mereka yang umumnya kumuh dan ditempat marjinal. Selanjutnya dikatakan, permukiman kumuh merupakan jerat dan perangkap kota sebaiknya perumahan yang baik sangat kondusif untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Di Indonesia masalah permukiman kota merupakan masalah kedua setelah kemiskinan, demikian Reksohadiprodjo dan Karseno (1982: 66).

Namun demikian yang menarik adalah bahwa penduduk miskin perkotaan memiliki etos kerja yang tinggi, yaitu bekerja keras, tidak menuntut bantuan atau subsidi dari pemerintah, dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan

tanpa menunggu uluran tangan dari luar (Silas, 2000: II-7) hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Jellineck dan Rustanto dari World Bank (Mubiyarto, 1998) bahwa rakyat akan mampu bertahan dan tidak akan sulit menyesuaikan diri dengan kondisi hidup susah karena daya tahan yang tinggi (tahan banting). Menekuni sebab-sebab kemiskinan perkotaan tidaklah jauh berbeda dengan kemiskinan pada umumnya. Masalah kemiskinan perkotaan dengan kemiskinan pedesaan pada khususnya maupun kemiskinan nasional pada umumnya (Widiyanto,1991). Sedangkan Soetrisno (1997) juga melihat terjadi kecenderungan bergesernya kemiskinan dari Kelurahan ke kota, karena penduduk miskin kelurahan “menyerbu” ke kota. Fenomena ini tidak sejalan dengan penyediaan sarana dan prasarana kota dan dikhawatirkan akan menjadikan beratnya pelayanan umum kota yang akhirnya berakibat terjadinya krisis seperti timbulnya kawasan permukiman umum karena keterbatasan sarana sanitasi.

2.5 Rangkuman Kajian Teori

Dinamika pembangunan kota mendorong perpindahan penduduk Kelurahan/ Desa ke kota. Pertambahan penduduk perkotaan sedemikian pesat belum diimbangi dengan prasarana perumahan dan permukiman yang memadai sehingga timbul kawasan-kawasan kumuh (*slum*) padat dan hunian liar (*squatter*) yang akhirnya berdampak pada masalah dengan limbah.

Didalam mengatasi permasalahan permukiman tidak dapat lepas dari partisipasi berbagai masyarakat, dimulai pada tahap persiapan, perencanaan,

pelaksanaan dan pemanfaatan serta pengembangan kajian terhadap teori keterlibatan masyarakat didalam proses pembangunan.

Selanjutnya teori-teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dirangkum sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.1

RANGKUMAN KAJIAN TEORI-TEORI PARTISIPASI

Pakar	Faktor-faktor Partisipasi dan Perbaikan Lingkungan	Variabel Terpilih
<p>PARTISIPASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ramos (Yeung & Mc Gee, 1986) 	Partisipasi memerlukan kesediaan kedua belah pihak dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan.	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian masyarakat tentang Partisipasi: <ul style="list-style-type: none"> Keanggotaan dalam organisasi Intensitas kehadiran dalam pertemuan Intensitas memberi sumbangan Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> Mata pencaharian Pendidikan Kesehatan Sikap sosial Program pemerintah Perbaikan dan pemeliharaan Permukiman: <ul style="list-style-type: none"> Kebersihan lingkungan permukiman Perbaikan dan pemeliharaan Sarana lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> Tempat peribadatan Lapangan olahraga/taman Tempat bermain Perbaikan dan pemeliharaan prasarana lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> Jalan lingkungan Drainase Tempat pembuangan sampah Perbaikan dan pemeliharaan rumah
<ul style="list-style-type: none"> Diana Conyers (1984) 	Seseorang tidak akan berpartisipasi jika dinilainya tidak membawa hasil, demikian sebaliknya.	
<ul style="list-style-type: none"> Stuart Chapin, Faisal K. dan Joseph F. Stepanek (Iskandar, 1994: 79) 	Penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> Keanggotaan seseorang dalam organisasi atau kelompok kegiatan masyarakat. Intensitas kehadiran seseorang dalam berbagai pertemuan masyarakat. Intensitas seseorang dalam memberikan sumbangan dana atau keuangan. Keanggotaan seseorang dalam berbagai kepanitiaan yang dibentuk dalam masyarakat. Posisi kepemimpinan seseorang dalam berbagai organisasi/ kelompok kegiatan. 	
<ul style="list-style-type: none"> Soelaiman (1985: 15-20) 	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> Sikap sosial Struktur dan pranata sosial yang berlapis-lapis Adanya sikap ketergantungan dan pasrah Kekecewaan masyarakat Kemiskinan Mobilisasi penduduk Program-program yang tidak berorientasi pada kebutuhan lokal 	
<ul style="list-style-type: none"> Chinchankar (Tri Wahyuni, 1997) 	Partisipasi tergantung kemauan individu akan 3 hal: mau membantu uang/barang; mau berbagi resiko dan tanggungjawab; mau mengelola kekuatan.	
<ul style="list-style-type: none"> Litwin (Tri Wahyuni, 1997) 	Partisipasi mencakup pengetahuan (<i>knowledge</i>), sikap (<i>attitude</i>) dan tindakan (<i>action</i>) dari masyarakat.	
<ul style="list-style-type: none"> Davis (Sastrosaputro, 1986) 	Partisipasi terdiri dari 3 hal penting: keterlibatan mental dan emosi; kesediaan memberi sumbangan; dan tanggungjawab.	

Pakar	Faktor-faktor Partisipasi dan Perbaikan Lingkungan	Variabel Terpilih
<ul style="list-style-type: none"> Ndraha, 1990 	6 tahap partisipasi: melalui kontak; memperhatikan/ menyerap dan merespon; perencanaan pembangunan; menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan; dan menilai pembangunan.	
<ul style="list-style-type: none"> Davis (Sastrosaputro, 1986) 	Jenis partisipasi ada 6: pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang dan uang.	
<p><u>PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PERMUKIMAN:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Gilbert, Gugler, Silas, 1999. 	Ciri/karakteristik kemiskinan perkotaan: permukiman kumuh (slum); hunian liar (squatter); ekonomi rumah tangga (household economic).	
<ul style="list-style-type: none"> World Bank; 1984 	Permukiman perkotaan yang baik memiliki: jasa pengairan kota, sanitasi, bak pembuangan sampah, penerangan jalan, jalan yang keras, dan akses untuk keadaan gawat; memiliki sekolah dan klinik yang mudah dijangkau dan aman; memiliki tempat untuk berkumpul dan bersosialisasi.	

Sumber: Hasil Analisis, 2005

BAB III

GAMBARAN UMUM KELURAHAN BATU SEMBILAN

3.1 Struktur Ruang Kawasan terhadap Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang tahun 2002-2012, Kelurahan Batu Sembilan termasuk wilayah pengembangan (WP) I dan Bagian Wilayah Kota (BWK) III. Fungsi dari wilayah ini merupakan pusat kegiatan pelayanan umum yang meliputi perdagangan dan jasa, transportasi regional dan lokal, pariwisata, pertanian dan permukiman.

Struktur ruang Kota Tanjungpinang berdasarkan pola yang terjadi saat ini berkembang mengikuti sumbu atau jaringan jalan yang bersifat linier ke arah timur (Kecamatan Bintan Timur), dan utara (Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Bintan).

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa di kawasan studi mengalami berbagai permasalahan lingkungan permukiman, antara lain: genangan air akibat saluran air tersumbat, muka air tanah (*water table*) yang tinggi, perumahan padat, sebagian besar penduduknya berpendapatan menengah ke bawah (miskin) dengan status sosial heterogen baik dari segi adat, budaya dan agama.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan serta mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan, maka contoh pengelolaan sampah di Kelurahan Batu Sembilan kiranya dapat digunakan sebagai

referensi untuk penanganan kawasan lain yang mengalami permasalahan lingkungan serupa

3.2 Gambaran Umum Kecamatan Tanjungpinang Timur

Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan Kecamatan hasil pemekaran yang dibentuk berdasarkan terbitnya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemekaran daerah. Dimana pada awalnya Kecamatan Tanjungpinang Timur semula adalah bagian dari wilayah Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Kecamatan Tanjungpinang Timur terletak antara 415° lintang utara dengan $0,48^{\circ}$ LS dan $101,10^{\circ}$ BT, 109° BB, dengan luas wilayah $52,5 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 70% lautan dan sisanya 30% daratan. Iklim di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah iklim tropis yang mempunyai temperature rata-rata $31,8^{\circ}\text{C}$ serta penilaian masyarakat tentang kelembaban udara 84%.

Dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan tersebut, maka secara otomatis berlaku pula pemekaran terhadap wilayah kelurahan yang ada di kecamatan itu. Dengan demikian, Kecamatan Tanjungpinang Timur mempunyai 5 (lima) wilayah Kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Batu Sembilan merupakan wilayah yang semula adalah Desa Batu Sembilan.
- b. Kelurahan Air Raja yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Batu Sembilan.

- c. Kelurahan Pinang Kencana yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Batu Sembilan.
- d. Kelurahan Kota Piring.
- e. Kelurahan Kampung Bulang yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Tanjung Unggat.

Batas wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Teluk Bintan dan Gunung Kijang.
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bintan Timur.
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tanjungpinang Kota.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tanjungpinang Barat.

3.3 Gambaran Umum Kelurahan Batu Sembilan

Kelurahan Batu Sembilan merupakan salah satu kelurahan yang berada di dalam wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan luas wilayah 2.467,2 ha yang terdiri dari 6 RW dengan 16 RT.

Kelurahan Batu Sembilan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kelurahan Air Raja.
- Sebelah Timur dengan Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur.
- Sebelah Selatan dengan Kelurahan Dompok.
- Sebelah Barat dengan Kelurahan Melayu Kota Piring.

Jumlah penduduk di Kelurahan Batu Sembilan akhir Desember 2004 berjumlah 8.219 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.417 KK, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 92/ km².

TABEL III.1
JUMLAH PENDUDUK DALAM WILAYAH RT

NO	RUKUN TETANGGA (RT)	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE (%)
1.	RT 01/RW I	594	7,23
2.	RT 02/RW I	604	7,35
3.	RT 03/RW I	494	6,01
4.	RT 04/RW II	305	3,71
5.	RT 05/RW II	592	7,20
6.	RT 06/RW III	597	7,26
7.	RT 07/RW III	594	7,23
8.	RT 08/RW III	495	6,02
9.	RT 09/RW IV	514	6,25
10.	RT 10/RW IV	411	5,00
11.	RT 11/RW IV	326	3,96
12.	RT 12/RW IV	340	4,14
13.	RT 13/RW V	683	8,31
14.	RT 14/RW V	584	7,12
15.	RT 15/RW VI	587	7,14
16.	RT 16/RW VI	499	6,07
JUMLAH		8.219	100,00

Sumber: Kantor Kelurahan Batu Sembilan, 2005.

Berdasarkan tabel III.1 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah persebaran penduduk di setiap RT relatif merata, yaitu berkisar antara 305 hingga 683 jiwa atau 3,71% hingga 8,31%. Jumlah penduduk yang terbanyak adalah di RT 13/ V, hal ini mengingat kawasan tersebut merupakan pemukiman penduduk dan berada di jalur yang padat, yaitu di sepanjang jalan raya yang menghubungkan kawasan Bintan Center atau daerah lain menuju ke Kecamatan Bintan Timur atau Bintan Utara, sedangkan jumlah penduduk yang terendah adalah di RT 04/ II, dimana di kawasan tersebut merupakan wilayah pemekaran dari RT 03. Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, hal ini akan menjadi potensi atau modal dasar tersendiri bagi Kelurahan Batu Sembilan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang melalui motivasi yang diberikan oleh Lurah.

Selanjutnya untuk mengetahui komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianutnya di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada Tabel III.2 sebagai berikut:

TABEL III.2
KEADAAN PENDUDUK MENURUT AGAMA

NO	AGAMA	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1.	Islam	7.479	91,00
2.	Katolik	319	3,88
3	Protestan	229	2,79
4.	Budha	145	1,76
5.	Hindu	47	0,57
6.	Lain	0	0,00
JUMLAH		8.219	100,00

Sumber: Kantor Kelurahan Batu Sembilan, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang menganut agama Islam ternyata sebanyak 7.479 jiwa atau 91,00%, kemudian secara berturut-turut diikuti jumlah penduduk yang menganut agama Katolik sebanyak 319 jiwa atau 3,88%; agama Protestan sebanyak 229 orang atau 2,79%; dan penganut agama Budha sebanyak 145 jiwa atau 1,76%; sedangkan untuk penganut agama Hindu sebanyak 47 orang atau 0,57% dan lainnya ternyata tidak terdapat penganut. Dengan semangat keagamaan serta iman yang kuat, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan motivasinya guna melaksanakan pembangunan yang tengah dilaksanakan di wilayah Kelurahan Batu Sembilan.

Selain keadaan penduduk menurut agama tersebut diatas berikut ini penulis kemukakan pula penduduk menurut penilaian masyarakat tentang umur:

TABEL III.3
KEADAAN PENDUDUK MENURUT UMUR

NO	UMUR	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1.	0 – 4	223	2,71
2.	5 – 9	219	2,66
3.	10 – 14	276	3,36
4.	15 – 19	289	3,52
5.	20 – 24	217	2,64
6.	25 – 29	1.198	14,58
7.	30 – 34	1.891	23,00
8.	35 – 39	1.886	22,95
9.	40 – 44	1.643	19,99
10.	45 – 49	140	1,70
11.	50 – 54	115	1,40
12.	55 – tahun keatas	122	1,48
JUMLAH		8.219	100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Batu Sembilan, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa proporsi penduduk yang terbanyak adalah pada kelompok umur 25-44 tahun, yaitu sebanyak 6.618 jiwa atau 80,52%. Untuk kelompok umur 45 tahun keatas hanya sebanyak 377 jiwa atau 4,58%, sedangkan untuk kelompok umur 0-24 tahun sebanyak 1.224 jiwa atau 14,89%. Komposisi usia penduduk yang demikian juga menunjukkan suatu potensi yang besar, mengingat penduduk terbanyak adalah berusia produktif, sehingga diharapkan mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan pembangunan di wilayah Kelurahan Batu Sembilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Selain penduduk menurut penilaian masyarakat tentang umur tersebut diatas, berikut ini penulis kemukakan penduduk menurut tingkat pendidikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

TABEL III. 4
KEADAAN PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1.	Belum sekolah	375	4,56
2.	Tidak tamat SD/ sederajat	216	2,63
3.	Tamat SD/ sederajat	1.434	17,45
4.	Tamat SLTP/ sederajat	3.084	37,52
5.	Tamat SLTA/ sederajat	2.778	33,80
6.	Tamat Akademi/ sederajat	214	2,60
7.	Tamat Perguruan Tinggi	118	1,44
Jumlah		8.219	100,00

Sumber : Kantor Kelurahan Batu Sembilan, 2005.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Batu Sembilan telah terbebas dari buta aksara, dimana penduduk sebagian besar telah mengenyam pendidikan dasar maupun menengah. Jumlah penduduk yang terbanyak adalah yang telah menamatkan pendidikan SLTP, yaitu sebanyak 3.084 atau 37,52%. Pendidikan terendah yang telah ditempuh penduduk adalah SD, yaitu sebanyak 1.434 orang atau 17,45%, meskipun sebagian ada yang belum menamatkan sekolahnya. Untuk tingkat pendidikan menengah ke atas/perguruan tinggi telah ditempuh sebanyak 3.110 orang atau 37,84%.

Selanjutnya di Kelurahan Batu Sembilan juga memiliki beberapa sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana akan penulis jelaskan berikut ini, antara lain mengenai sarana pendidikan:

TABEL III.5
KEADAAN SARANA PENDIDIKAN

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (UNIT)	STATUS
1.	Taman Kanak-kanak	1	Swasta
2.	Sekolah Dasar	2	Negeri
3.	SLTP	1	Negeri
4.	SLTA	-	-
JUMLAH		4	

Sumber : Kantor Kelurahan Batu Sembilan, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah sarana pendidikan di Kelurahan Batu Sembilan relatif sudah memadai, mengingat jumlah penduduk usia sekolah (5-19 tahun) sebanyak 1.007 orang, sedangkan jumlah sekolah yang ada sebanyak 9 unit dengan jumlah lokal kelas sebanyak 26, sehingga hal ini dapat diestimasikan bahwa ratio antara jumlah murid dengan lokal kelas adalah 1 : 42, artinya bahwa dalam satu kelas terdapat 42 orang murid. Hal ini tentunya cukup ideal dan cukup mendukung dalam proses belajar-mengajar, dimana secara ideal dalam satu kelas adalah sebanyak 30-40 orang murid.

Selanjutnya untuk mengetahui sarana ibadah/ agama sebagaimana penulis jelaskan pada tabel berikut:

TABEL III.6

KEADAAN SARANA IBADAH / AGAMA

NO.	SARANA	JUMLAH (UNIT)	KEADAAN
1.	Surau/Mushalla	7	Baik
2.	Masjid	2	Baik
3.	Vihara	-	Baik
4.	Gereja	1	Baik
JUMLAH		10	

Sumber : Kantor Kelurahan Batu Sembilan, 2005.

Sarana peribadatan sangat penting bagi upaya peningkatan pendidikan keagamaan dan mental spiritual masyarakat untuk beribadah kepada Tuhan YME serta menjalankan segala ketentuan agama dengan ketaatan yang penuh. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sarana peribadatan di Kelurahan Batu Sembilan sudah cukup memadai, dimana pada setiap RW telah terdapat sarana peribadatan, khususnya masjid dan surau/ mushalla.

Selanjutnya dalam kehidupan masyarakat suatu wilayah juga diperlukan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan, agar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat serta aktivitas sehari-hari masyarakat dapat menjalankannya dengan penilaian masyarakat tentang kesehatan yang prima. Dengan kesehatan fisik yang prima, maka diharapkan dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental yang baik.

Untuk mengetahui sarana kesehatan dan tenaga medis di Kelurahan Batu Sembilan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III. 7
KEADAAN SARANA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS

NO.	SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Puskesmas	1	Dibangun tahun 1985
2.	Puskesmas Pembantu (Pustu)	-	
3.	Posyandu	9	Aktif
4.	Dokter	1	Buka Praktek
5.	Bidan	2	Buka Praktek
6.	Mantri	3	di Puskemas
7.	Apotik	1	-
8.	Toko Obat	3	-

Sumber : Kantor Kelurahan Batu Sembilan, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa jumlah sarana dan tenaga medis di Kelurahan Batu Sembilan relatif sudah mencukupi, namun dari segi kapasitas dan kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan sarana prasarana yang lebih lengkap dan jumlah tenaga medis yang lebih memadai. Kondisi yang demikian diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bagi warga untuk meningkatkan motivasinya guna melaksanakan pembangunan.

Pembangunan prasarana fisik yang telah dibangun di Kelurahan Batu Sembilan juga patut dicatat, khususnya sarana jalan untuk memperlancar roda perekonomian di daerah tersebut yang menghubungkan antara Kelurahan Batu Sembilan dengan daerah-daerah lain.

TABEL III.8

KEADAAN SARANA JALAN

NO.	SARANA	PANJANG (Km)	KEADAAN
1.	Jalan aspal	12	Sebagian rusak
2.	Jalan tanah	2,6	Perlu ditingkatkan
3.	Jalan batu	3	Perlu ditingkatkan
4.	Jalan beton	1,3	Baik
5.	Jalan kayu/pelantar	-	-

Sumber : Kantor Kelurahan Batu Sembilan, 2005.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jalan aspal yang menghubungkan antar wilayah di dalam Kelurahan Batu Sembilan sudah cukup memadai, namun untuk jenis jalan-jalan seperti jalan tanah, jalan batu, dan jalan beton (paving block) perlu ditingkatkan. Untuk jalan aspal yang sebagian rusak, pada saat ini sedang dalam proses perbaikan oleh Dinas PU Kota Tanjungpinang. Pembangunan sarana/prasarana fisik yang dilaksanakan di Kelurahan Batu

Sembilan diharapkan memperoleh kontribusi dari segenap warga masyarakat untuk meningkatkan semangat/ motivasi yang terus menerus, sehingga masyarakat senantiasa dapat berpartisipasi membantu pemerintah Kelurahan Batu Sembilan untuk mendorong percepatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya untuk mengetahui sarana pengangkutan dan sarana komunikasi yang berada di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL III. 9
KEADAAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

NO.	SARANA	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN
1.	Mobil	98	Baik
2.	Oplet	12	Baik
3.	Bus	1	-
4.	Truck	6	Baik
5.	Sepeda motor	377	Baik
6.	Sepeda	264	Baik
7.	Telepon	328	Baik
8.	Radio	1.342	Baik
9.	Televisi	1.521	Baik

Sumber : Kantor Kelurahan Batu Sembilan, 2005.

Kondisi kepemilikan sarana pengangkutan dan komunikasi masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas ternyata menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar meningkat kesejahteraannya, dimana sebagian besar warga telah mampu memiliki kendaraan roda empat atau kendaraan roda dua, TV dan sarana telepon. Hal ini hendaknya dapat menjadi pendorong bagi peningkatan motivasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di segala aspek di wilayah Kelurahan Batu Sembilan guna mewujudkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui sarana dan prasarana sosial di Kelurahan Batu Sembilan , dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL III.10
KEADAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

NO.	SARANA	JUMLAH (UNIT)	KEADAAN
1.	Pos Polisi/Polsek	1	Baik
2.	Pos Hansip/Pos Kamling	5	Baik
3.	Gedung PKK	1	Baik
4.	Kantor Kelurahan	1	Baik
5.	Balai Pertemuan/Aula	1	Baik
6.	Gedung Serbaguna	-	-

Sumber : Kantor Kelurahan Batu Sembilan, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah sarana dan prasarana sosial relatif sudah memadai, sehingga hal ini perlu mendapatkan dukungan/motivasi dari Lurah terhadap masyarakat untuk meningkatkan peran aktifnya dalam pembangunan di masa mendatang.

3.3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Batu Sembilan

Berdasarkan komposisi jumlah pegawai yang bekerja di Kantor Lurah Batu Sembilan, maka dapat disusun struktur organisasi di masing-masing unit. Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan oleh Perda Kota Tanjungpinang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tanjungpinang, dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Gambar III.1.

GAMBAR 3.1
BAGAN STRUKUR ORGANISASI KELURAHAN BATU SEMBILAN



Sumber : Kantor Kelurahan Batu Sembilan, 2005.

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa tiap-tiap Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah dan dibantu oleh sekretaris kelurahan dan kepala-kepala seksi, dimana setiap kepala seksi melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan urusan dan bagian kerjanya. Namun seluruh wilayah kelurahan yang berada dibawah kepemimpinan camat adalah cakupan tugas serta tanggung jawab camat, dan secara administrasi masing-masing kelurahan bertanggung jawab terhadap seluruh rencana, kegiatan, evaluasi yang telah mereka buat sebagai pimpinan wilayah kerja.

3.3.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan Laporan Tahunan/ Monografi Kelurahan Batu Sembilan dilaporkan bahwa Kelurahan Batu Sembilan pada akhir tahun 2004 berpenduduk

6.293 jiwa yang tersebar di 4 dusun, 8 RW dan 21 RT, dengan jumlah kepala keluarga 2.401. Luas wilayah total 133,93 ha, bangunan dan pekarangan 132,35 Ha, sehingga kepadatan penduduk adalah 165 jiwa/ ha. Di kawasan ini 43% rumah-rumah ditempati dua keluarga, 26% ditempati 4 keluarga dan 24% ditempati satu keluarga. Sebagian besar dengan mata pencaharian sebagai buruh termasuk buruh tani (45,64%), pengusaha (25,57%), pedagang (21,31%).

3.3.3 Kondisi Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat di lokasi kawasan studi dapat dilihat dari kecenderungan penyakit yang diderita masyarakat setempat dan sekitarnya. Hal ini dapat didekati dari data kunjungan pasien ke Puskesmas terdekat. Dari kasus penyakit yang diderita dan tercatat di Puskesmas Batu 10, maka dapat disimpulkan bahwa penyakit yang disebabkan oleh *environment born disease* menempati rangking kedua dan tiga. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sanitasi lingkungan di lokasi kawasan studi sangat jelek atau kurang memenuhi syarat kesehatan. Jika kemudian dikaitkan dengan hasil analisis sumur penduduk di kawasan ini, dapat diketahui bahwa *parameter koliform* sampah melampaui batas ambang syarat kualitas air bersih Permenkes, maka sangat signifikan antara penyakit yang diderita masyarakat dengan kondisi air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Oleh sebab itu sangatlah tepat apabila pemberian sistem sanitasi lingkungan mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.



GAMBAR 3.2
LOKASI: JL. DI. PANJAITAN KM.10 (DEPAN MASJID RAYA)
KEL. BATU SEMBILAN

Para pengguna jalan terpaksa harus berusaha mencari jalan yang tidak tergenang air supaya tidak jatuh (ini sebagai bukti bahwa drainase yang dibangun pemerintah ternyata belum memenuhi kebutuhan, karena volume curah hujan tidak tertampung, sehingga terjadi banjir)



GAMBAR 3.3
LOKASI: KAMPUNG SIDOMULYO KEL. BATU SEMBILAN
 Salah satu jalan perkampungan yang belum tersentuh program pemerintah Kota Tanjungpinang (meskipun di kampung ini merupakan salah satu produsen sayur-mayur/hasil pertanian)



GAMBAR 3.4
LOKASI: JL. HANG LEKIR KM.10
(MENUJU GEREJA PANTEKOSTA)
KEL. BATU SEMBILAN

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat setempat yang berswadaya membangun jalan perkampungan (jalan ini pernah diperbaiki oleh pemko melalui program semenisasi tahun 1996, namun kini kondisinya rusak berat)



GAMBAR 3.5
LOKASI: KOMPLEK PERUMAHAN BUMI INDAH DAN KAWASAN
BINTAN CENTER (BELAKANG PASAR BINTAN CENTER KELURAHAN
BATU SEMBILAN)

Pada umumnya masyarakat membuang sampah ke bak-bak penampungan (baik sendiri-sendiri maupun melalui pekerja yang telah diupah di masing-masing RT)



GAMBAR 3.6

KONDISI PEMUKIMAN WARGA KAMPUNG SIDOREJO

Petugas dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang sedang melakukan 'anjingsana' dan pemberian motivasi kepada keluarga miskin yang kondisi rumahnya tergolong tidak layak huni di Kampung Sidorejo (RT 09/RW III) Kelurahan Batu Sembilan



GAMBAR 3.7
KONDISI PEMUKIMAN WARGA KAMPUNG TOBONGBATA
Kondisi perumahan/permukiman warga Kampung Tobong Bata (RT 06/RW VI)
Kelurahan Batu Sembilan yang berbatasan dengan Desa Dompok Laut. Kawasan ini
sebagian besar tanahnya berawa-rawa

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DI KELURAHAN BATU SEMBILAN

4.1 Karakteristik Responden

Sebelum membahas mengenai variabel penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka terlebih dahulu akan dikemukakan karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu yang mencakup jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan/ jabatan, suku/ etnis, dan agama yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel-tabel sebagai berikut:

TABEL IV.1

KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	Laki-laki	96	83,48
2.	Perempuan	19	16,52
JUMLAH		115	100,00

Sumber: Data Olahan Kuesioner (Romawi I point b), 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa dari jumlah responden laki-laki ternyata lebih besar dibandingkan jumlah responden perempuan, yaitu responden laki-laki sebanyak 96 orang atau 83,48% dan responden perempuan 19 orang atau 16,52%. Dengan demikian, diharapkan bahwa partisipasi harus dapat di penilaian masyarakat tentangan dalam rangka melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah yang meskipun responden lebih banyak laki-laki, namun tidak

dapat menjadi alasan bahwa responden perempuan untuk tidak berperan aktif dalam kegiatan pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman di Kelurahan Batu Sembilan.

Selanjutnya untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL IV.2
KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN UMUR

NO	UMUR	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	Kurang dari 21 tahun	3	2,61
2.	21-30 tahun	21	18,26
3.	31-40 tahun	53	46,09
4.	41-50 tahun	25	21,74
5.	Lebih dari 50 tahun	13	11,30
JUMLAH		115	100,00

Sumber: Data Olahan Kuesioner (Romawi 1 point c), 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berusia kurang dari 21 tahun sebanyak 3 orang atau 2,61%, responden yang berusia antara 21-30 tahun sebanyak 21 orang atau 18,26%, responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 53 orang atau 46,09%, responden yang berusia 41-25 tahun sebanyak 25 orang atau 21,74% dan responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 13 orang atau 11,30%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah pada usia 31-40 tahun, yaitu sebanyak 53 orang atau 46,09%. Usia tersebut merupakan kelompok usia yang produktif dan kedewasaan, sehingga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya untuk melaksanakan program dan kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang di wilayah Kelurahan Batu Sembilan yang telah ditetapkan, yaitu dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, dukungan dari responden yang berusia matang dan lebih tua sangat diperlukan untuk mendukung dan memberikan pemikiran yang konstruktif kepada responden yang lebih muda agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan optimal.

Selanjutnya untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL IV.3
KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	SD/Sederajat	29	25,22
2.	SLTP/Sederajat	31	26,96
3.	SLTA/Sederajat	44	38,26
4.	Perguruan Tinggi/Akademi	11	9,57
JUMLAH		115	100,00

Sumber: Data Olahan Kuesioner (Romawi I point d), 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 29 orang atau 25,22%, SLTP sebanyak 31 orang atau 26,96%, SLTA sebanyak 44 orang atau 38,26% dan perguruan tinggi sebanyak 11 orang atau 9,57%. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran bahwa sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Batu Sembilan sudah relatif memadai, karena sebagian besar responden adalah berpendidikan menengah dan perguruan tinggi. Kondisi yang demikian diharapkan dapat menampilkan partisipasi yang tinggi dalam melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan.

Selanjutnya untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan mata pencaharian, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL IV.4
KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN
MATA PENCAHARIAN

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	Petani	43	37,39
2.	Pedagang / Wiraswasta	34	29,57
3.	Buruh	28	24,35
4.	P N S	8	6,96
5.	Pensiunan Sipil / ABRI	2	1,74
JUMLAH		115	100,00

Sumber: Data Olahan Kuesioner (Romawi I point e), 2005.

Tabel IV.4 tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki matapencaharian sebagai petani, yaitu sebanyak 43 orang atau 37,39%, kemudian diikuti responden yang bermata pencaharian sebagai pedagang/wiraswasta, yaitu sebanyak 34 orang atau 29,57%. Dapat diketahui pula bahwa responden yang bermatapencaharian sebagai buruh sebanyak 28 orang atau 24,35% dan pegawai negeri sipil (termasuk pensiunan) masing-masing sebanyak 8 orang dan 2 orang atau 6,96% dan 1,74%.

Dengan komposisi mata pencaharian responden yang demikian, menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan responden relatif belum memadai, namun demikian diharapkan mereka dapat memiliki partisipasi yang tinggi untuk berperan aktif dalam melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur. Dalam hal ini peranan pimpinan (Lurah, RT/ RW dan tokoh masyarakat) sangat penting untuk mendorong dan

memberikan motivasi kepada warganya dalam setiap usaha perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman di wilayah Kelurahan Batu Sembilan.

Selanjutnya untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan rata-rata penghasilan dalam satu bulan, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL IV.5
KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN
PENGHASILAN RATA-RATA DALAM SATU BULAN

NO.	PENGHASILAN RATA-RATA	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	Kurang dari Rp. 300.000,-	3	2,61
2.	Rp.301.000,- s/d Rp. 400.000,-	15	13,04
3.	Rp.401.000,- s/d Rp. 500.000,-	19	16,52
4.	Rp.501.000,- s/d Rp. 600.000,-	42	36,52
5.	Rp.601.000,- s/d Rp. 700.000,-	13	11,30
6.	Rp.701.000,- s/d Rp. 800.000,-	10	8,70
7.	Lebih dari Rp.800.000,-	13	11,30
JUMLAH		115	100,00

Sumber: Data Olahan Kuesioner (Romawi I point g), 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata penghasilan responden sebagian besar berada di bawah Upah Minimum Kota/Propinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan sebesar Rp.740.000,-, yaitu sebanyak 92 orang atau 80,00%. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden adalah berada di ambang garis kemiskinan. Berdasarkan data dari Kelurahan Batu Sembilan, diperoleh data bahwa jumlah keluarga miskin yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pada tahun 2005 adalah sebanyak 693 Kepala Keluarga.

Selanjutnya untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan daerah asal atau suku/etnis, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL IV.6
KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN SUKU/ETNIS

NO.	DAERAH ASAL	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	Jawa	43	37,39
2.	Etnis Cina	5	4,35
3.	Minang	14	12,17
4.	Melayu	22	19,13
5.	Madura/Bawean	28	24,35
6.	Kalimantan	3	2,61
JUMLAH		115	100,00

Sumber: Data Olahan Kuesioner (Romawi I point f), 2005.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden bukan etnis/ suku asli Melayu, karena ternyata responden yang berasal dari suku Melayu hanya sebanyak 22 orang atau 19,13%, sedangkan responden yang terbanyak adalah berasal dari suku Jawa yaitu sebanyak 43 orang atau 37,39%, disusul kemudian responden berasal dari suku Madura/ Bawean yaitu sebanyak 28 orang atau 24,35%. Dalam penelitian ini juga ditemukan responden yang berasal dari etnis Cina, Kalimantan dan Minang, masing-masing sebanyak 5, 3 dan 14 orang.

Keragaman atau heterogenitas responden tersebut juga menggambarkan bahwa keadaan penduduk Kelurahan Batu Sembilan merupakan kesatuan warga yang beraneka ragam asal daerahnya, namun dapat hidup rukun dan damai, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Hal ini juga merupakan potensi yang besar bagi pertumbuhan dan peningkatan aktivitas masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui peningkatan partisipasi dalam pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman di wilayah Kelurahan Batu Sembilan.

TABEL IV.7

REKAPITULASI KARAKTERISTIS RESPONDEN

NO	KARATERISTIS RESPONDEN	JUMLAH	%
1	Berdasarkan jenis kelamin		
	▪ Laki-laki	96	83,48
	▪ Perempuan	19	16,52
2	Berdasarkan umur		
	▪ Kurang dari 21 tahun	3	2,61
	▪ 21-30 tahun	21	18,12
	▪ 31-40 tahun	53	46,09
	▪ 41-50 tahun	25	21,73
	▪ lebih dari 50 tahun	13	11,30
3	Berdasarkan pendidikan		
	▪ Sd/Sederajat	29	25,22
	▪ SLTP/Sederajat	31	26,96
	▪ Perguruan tinggi/Akademi	44	38,26
		11	9,57
4	Berdasarkan mata pencaharian		
	▪ Petani	43	37,29
	▪ Pedagang/wiraswasta	34	29,57
	▪ Buruh	28	24,35
	▪ PNS	8	6,69
	▪ Pensiunan Sipil/ABRI	2	1,74
5	Berdasarkan penghasilan rata-rata satu bulan		
	▪ Kurang dari Rp.300.000,-	3	2,61
	▪ Rp.301.000,- s/d Rp.400.000,-	15	13,04
	▪ Rp.401.000,- s/d Rp.500.000	19	16,52
	▪ Rp.501.000,- s/d Rp.600.000,-	42	36,52
	▪ Rp.601.000,- s/d Rp.700.000,-	13	11,30
	▪ Rp.701.000,- s/d Rp.800.000,-	10	8,70
▪ Lebih dari Rp.800.000,-	13	11,30	
6	Berdasarkan suku/etnis		
	▪ Jawa	43	37,39
	▪ Cina	5	4,35
	▪ Minang	14	12,17
	▪ Melayu	22	19,13
	▪ Madura/Bawean	28	24,35
	▪ Kalimantan	3	2,61

Sumber: Data olahan kuisioner Romawi I a s/d g

Dengan mencermati tabel diatas dapat dianalisis bahwa berdasarkan karakteristik masyarakat ditemukan bahwa penduduk mayoritas berada pada garis kemiskinan dimana 80% penghasilannya dibawah UMK Propinsi Riau yaitu sebesar RP.740,000,-, namun demikian terdapat beberapa kekuatan atau peluang untuk nantinya dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan

kegiatan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman, dilihat dari jumlah penduduk yang terbanyak adalah laki-laki yang mau menyumbangkan tenaganya serta kehidupan masyarakatnya yang heterogen dan saling menghargai/menghormati sesama.

4.2 Analisis terhadap Penilaian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu usaha untuk menggerakkan masyarakat agar mereka ikut terlibat baik secara mental maupun emosional untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama. Demikian pula halnya dengan upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman, apabila lingkungan permukiman dapat terpelihara dan senantiasa dalam kondisi baik/ bermanfaat sesuai yang diinginkan, maka harus di dukung oleh adanya partisipasi dari masyarakat.

Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman di Kelurahan Batu Sembilan dapat dilihat dari 10 (sepuluh) variabel, yaitu: bentuk organisasi, aktivitas organisasi, keanggotaan dalam organisasi/kegiatan masyarakat, intensitas kehadiran dalam pertemuan, intensitas memberi sumbangan; perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal, perbaikan dan pemeliharaan sarana permukiman, perbaikan prasarana permukiman, sikap sosial, dan program pemerintah.

a. Bentuk Organisasi

Bentuk organisasi merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang mencerminkan adanya partisipasi masyarakat setempat untuk mengatasi

masalah yang dihadapi oleh mereka, yaitu perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman. Kriteria dari bentuk organisasi adalah: organisasi yang bersifat profit, organisasi yang bersifat non profit, dan organisasi informal.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai bentuk organisasi apa yang cenderung dibentuk dan diikuti oleh masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL IV.8
PENILAIAN RESPONDEN TENTANG
BENTUK ORGANISASI YANG DIKUTI

NO	BENTUK ORGANISASI	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	Organisasi bersifat profit	23	20,00
2.	Organisasi bersifat non profit	35	30,43
3.	Organisasi informal	57	49,57
JUMLAH		115	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang cenderung menjadi anggota organisasi yang bersifat profit sebanyak 23 orang atau 20,00%, organisasi yang bersifat non profit sebanyak 35 orang atau 30,43%, dan yang menjadi anggota organisasi informal sebanyak 57 orang atau 49,57%.

Dapat dijelaskan bahwa organisasi profit atau organisasi yang memberikan keuntungan (profit) yang diikuti oleh anggota masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan pada umumnya adalah Koperasi, karena dengan menjadi anggota koperasi (seperti Koperasi Unit Desa Batu IX misalnya) akan memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut, sehingga dengan keuntungan tersebut dapat menambah penghasilan keluarga yang selanjutnya diharapkan dapat dikontribusikan pula terhadap upaya perbaikan dan

pemeliharaan lingkungan permukiman. Demikian pula dengan menjadi anggota organisasi partai politik, dimana masyarakat akan memperoleh suatu ‘keuntungan’ berupa status atau posisi yang diharapkan pada suatu saat nanti dapat meraih posisi/kekuasaan di legislatif yang pada akhirnya diharapkan dapat menetapkan kebijakan dalam upaya perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat.

Responden juga pada umumnya mengikuti atau menjadi anggota organisasi non profit, yaitu suatu organisasi yang tidak dapat memberikan keuntungan secara finansial, namun lebih cenderung dapat memperoleh keuntungan moral atau bahkan lebih condong kepada upaya ‘*charity*’ (amal ibadah) semata. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan responden menjadi anggota suatu Yayasan yang menangani masalah-masalah sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti LSM Granat, LSM Coremap, LSM Sirih Besar dan sebagainya, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar wilayah Kelurahan Batu Sembilan, yang diharapkan sangat besar kontribusinya dalam upaya perbaikan dan pemeliharaan permukiman masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan.

Selain itu, dalam penelitian ini juga ditemukan fakta, dimana responden yang terbanyak adalah berkiprah menjadi anggota organisasi informal, atau dengan istilah lain adalah organisasi tanpa bentuk, karena tidak ada kejelasan struktur dan status hukum organisasinya, namun disisi lain sangat memberikan arti bagi kehidupan masyarakat. Organisasi tersebut misalnya paguyuban-paguyuban atau ikatan-ikatan keluarga besar warga perantau, atau bahkan

perkumpulan warga tempatan, seperti: Among Mitro, Ikatan Keluarga Batak, Ikatan Keluarga Pacitan, Ikatan Keluarga Flores, Perkumpulan Putra-Putri Melayu, Perkumpulan Warga Tempatan (Perpat), Perkumpulan Arisan, Perkumpulan Wirid dan sebagainya yang kesemuanya itu merupakan modal dasar bagi upaya perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat yang tinggal di Kelurahan Batu Sembilan. Berdasarkan tanggapan/penilaian responden, bahwa organisasi informal tersebut lebih efektif dalam menggalang persatuan dan kesatuan serta lebih memiliki keterikatan emosional yang kuat, dimana antara satu dan anggota lainnya saling memiliki perasaan yang sama, saling membantu, saling bekerjasama atau saling tolong menolong. Dapat dicontohkan misalnya pada kasus terjadinya bencana angin puting beliung di daerah Kp. Tobong Bata (berbatasan dengan Desa Dompok Laut) pada bulan Oktober tahun 2004 yang dialami oleh beberapa keluarga yang berasal dari Jawa Tengah, sehingga terjadi kerusakan rumah dan lingkungan yang berat, maka dengan serta merta Ikatan Keluarga Jawa (Among Mitro) memberikan bantuan untuk perbaikan/pemugaran rumah-rumah anggotanya yang rusak. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi informal dinilai oleh masyarakat lebih efektif, sehingga memberikan kecenderungan bagi masyarakat untuk menjadi anggotanya.

b. Aktivitas Organisasi

Aktivitas organisasi mencerminkan adanya partisipasi masyarakat yang berupaya untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi secara bersama-sama atau untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam perbaikan dan pemeliharaan

lingkungan permukiman. Dalam hal ini aktivitas organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria, yaitu: aktivitas di bidang ekonomi, aktivitas di bidang sosial, dan aktivitas di bidang seni budaya.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai sejauhmana aktivitas organisasi yang diikuti masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL IV.9
PENILAIAN RESPONDEN TENTANG
AKTIVITAS ORGANISASI

NO	AKTIVITAS ORGANISASI	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	Aktivitas di bidang ekonomi	22	19,13
2.	Aktivitas di bidang sosial	42	36,52
3.	Aktivitas di bidang seni budaya	51	44,35
JUMLAH		115	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang memberi penilaian bahwa organisasi yang diikuti memiliki aktivitas di bidang ekonomi sebanyak 22 orang atau 19,13%, organisasi yang aktif di bidang sosial sebanyak 42 orang atau 36,52%, dan yang menjawab bahwa organisasi aktif di bidang seni budaya sebanyak 51 orang atau 44,35%.

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa, warga masyarakat Kelurahan Batu Sembilan lebih condong mengikuti suatu organisasi yang aktif dalam bidang seni budaya. Hal ini sangat jelas apabila dibandingkan dengan tabel sebelumnya, bahwa sebagian besar responden lebih cenderung memasuki dan menjadi anggota organisasi informal.

c. Keanggotaan dalam Organisasi/Kegiatan Masyarakat

Variabel keanggotaan dalam organisasi/ kegiatan masyarakat merupakan penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah mengatasi masalah lingkungan permukiman, dan memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi kehidupan/ kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kriteria dari variabel keanggotaan dalam organisasi/ kegiatan masyarakat terdiri atas: menjadi anggota atas kesadaran sendiri, menjadi anggota karena terpaksa, dan menjadi anggota karena ikut-ikutan.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai mengapa/ alasan keikutsertaan masyarakat dalam organisasi di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL IV.10
PENILAIAN RESPONDEN TENTANG
KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM ORGANISASI

NO	KEIKUTSERTAAN	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	Atas kemauan sendiri	56	48,70
2.	Karena terpaksa/ adanya paksaan	35	30,43
3.	Karena ikut-ikutan	24	20,87
JUMLAH		115	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang cenderung menjadi anggota organisasi karena atas kemauan sendiri sebanyak 56 orang atau 48,70%, menjadi anggota organisasi karena terpaksa/paksaan sebanyak 35 orang atau 30,43%, dan yang menjadi anggota organisasi tidak tahu alasannya sebanyak 24 orang atau 20,87%.

Responden yang model pertama menjelaskan bahwa keikutsertaannya dalam suatu organisasi karena atas kemauan sendiri, yaitu seperti Koperasi Serba Usaha “Mandiri”, KUD Batu 10, LSM (Coremap, Granat). Hal ini didasari oleh suatu pemikiran bahwa dengan menjadi anggota suatu organisasi tertentu, akan dapat membantu dirinya dalam memecahkan suatu masalah atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan responden tipe kedua, yaitu menjadi anggota karena terpaksa/paksaan menjelaskan bahwa mereka menjadi anggota suatu organisasi atau perkumpulan karena memang atas dasar keterpaksaan, misalnya karena keterikatan ‘*marga/fam*’, atau karena kesamaan keyakinan dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula tipe responden ketiga, yaitu menjadi anggota suatu organisasi karena tidak tahu alasannya, atau lebih banyak karena ikut-ikutan. Hal ini diakui oleh responden bahwa sebagian besar alasan mereka menjadi anggota organisasi tersebut lebih didasari oleh hobi atau kesenangan semata, misalnya menjadi anggota perkumpulan sanggar tari (Sanggar Tari Rentak Melayu), perkumpulan remaja (REKAL/ Remaja Kampung Lembah Asri).

d. Intensitas Kehadiran dalam Setiap Pertemuan

Intensitas kehadiran dalam pertemuan dipengaruhi oleh adanya kesadaran akan partisipasi dan perbaikan lingkungan serta alasan yang bersifat profit (menguntungkan). Adapun kriterianya meliputi: aelalu (hadir lebih dari 75%), sering (hadir antara 50%-75%), dan kadang-kadang (hadir kurang dari 50%).

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai intensitas kehadiran dalam pertemuan yang diadakan oleh masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL IV.11
PENILAIAN RESPONDEN TENTANG
INTENSITAS KEHADIRAN DALAM PERTEMUAN
MASYARAKAT

NO	INTENSITAS KEHADIRAN	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	Selalu (Hadir lebih dari 75%)	46	40,00
2.	Sering (Hadir antara 50%-75%)	39	33,91
3.	Kadang-kadang (Hadir kurang dari 50%)	30	26,09
JUMLAH		115	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang cenderung selalu hadir dalam pertemuan masyarakat (hadir lebih dari 75%) sebanyak 46 orang atau 40,00%, sering (hadir antara 50%-75%) sebanyak 39 orang atau 33,91%, dan yang kadang-kadang (hadir kurang dari 50%) sebanyak 30 orang atau 26,09%.

Responden yang selalu hadir dalam setiap pertemuan, menjelaskan bahwa mereka berusaha senantiasa hadir dalam pertemuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini ditemukan fakta, bahwa responden yang selalu hadir dalam setiap pertemuan organisasi atau pertemuan masyarakat adalah mereka yang menjadi anggota organisasi informal, seperti kelompok-kelompok pengajian/wirid/arian dan sebagainya. Hal ini dapat digambarkan bahwa misalnya pertemuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu sebanyak 10 kali, ternyata responden lebih dari 75% (lebih dari 7 kali) telah dapat hadir dalam pertemuan tersebut. Lebih jauh dijelaskan oleh responden bahwa intensitas kehadiran dalam pertemuan

organisasi tersebut sangat berpengaruh terhadap interaksi dengan warga sekitar dan dapat memberikan kesan hubungan yang harmonis, artinya bahwa dalam pergaulan masyarakat sekitar, mereka yang intensif hadir dalam pertemuan cenderung lebih 'diterima' oleh lingkungannya yang berarti pula telah berhasil dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Kecenderungan lainnya adalah, masyarakat lebih takut memperoleh hukuman sosial, yang berupa pengucilan, cemooh, gunjingan (khususnya bagi kaum ibu/wanita) dan sebagainya, sehingga hal ini nantinya dapat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga mereka yang memperoleh 'label' sebagai orang yang tidak bisa bermasyarakat.

Dijelaskan pula oleh responden, bahwa intensitas kehadiran dalam pertemuan tersebut juga sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil dalam rapat, sehingga dengan banyaknya warga/anggota yang hadir, maka keputusan dapat dicapai secara mufakat/bulat. Ini akan dapat memberikan keuntungan (profit) bagi para anggota, yaitu berupa dukungan atau bantuan baik moril maupun materiil dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi. Salah satu contoh adalah: rapat yang menghasilkan keputusan untuk mengadakan gotong-royong perbaikan musholla, dimana para anggota saling bekerjasama dan memberikan bantuan baik tenaga, pikiran maupun uang/ barang untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Kegiatan lain yang serupa juga sering diputuskan dalam rapat-rapat organisasi informal seperti ini, khususnya dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman di wilayah Kelurahan Batu Sembilan.

e. Intensitas Memberi Sumbangan

Intensitas memberi sumbangan merupakan cerminan dari wujud partisipasi, kepedulian akan hakekat masalah dan untuk membiayai maupun untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman yang sehat dan kondisi kehidupan yang sejahtera. Sedangkan kriterianya meliputi: sumbangan pikiran, sumbangan uang/materi, dan sumbangan tenaga.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai intensitas sumbangan yang diberikan oleh masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**TABEL IV.12
PENILAIAN RESPONDEN TENTANG
INTENSITAS MEMBERI SUMBANGAN**

NO	PENILAIAN	JUMLAH RESPONDEN	%
1.	Sumbangan pikiran	30	26,09
2.	Sumbangan uang/materi	41	35,65
3.	Sumbangan tenaga	44	38,26
JUMLAH		115	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang memberikan sumbangan pikiran sebanyak 30 orang atau 26,09%, responden yang memberikan sumbangan uang/materi sebanyak 41 orang atau 35,65%, dan yang memberi sumbangan tenaga sebanyak 44 orang atau 38,26%.

Dapat dijelaskan, bahwa responden yang memberikan sumbangan berupa pikiran, pada umumnya adalah responden yang aktif dalam organisasi dan telah menjadi pengurus organisasi, yaitu dengan memberikan gagasan-gagasan atau

pemikiran untuk kemajuan organisasi maupun untuk pelaksanaan program/kegiatan kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan usaha pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman, seperti: organisasi LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Karang Taruna, LSM Granat, LSM Coremap dan sebagainya. Adapun responden yang lebih banyak memberikan sumbangan uang/materi pada umumnya lebih tidak memiliki waktu untuk ikut aktif dalam kegiatan masyarakat, seperti misalnya kaum pedagang/wiraswasta, pelaut dan sebagainya yang lebih menonjolkan bentuk partisipasinya dengan memberikan sumbangan uang/ materi. Sumbangan yang berkaitan dengan upaya pemeliharaan lingkungan permukiman yang harus diberikan, seperti: uang kebersihan/penyediaan jasa pembuangan sampah (tiap bulan rata-rata sebesar Rp. 15.000,-, dan setiap kawasan bervariasi serta adanya pertimbangan terhadap keluarga yang kurang mampu yang biasanya diberikan keringanan atau bahkan dibebaskan dari sumbangan tersebut), uang keamanan/ penyediaan jasa ronda malam (tiap bulan rata-rata Rp.5.000,-), sumbangan untuk perbaikan rumah ibadah, sumbangan untuk perbaikan jalan dan gorong-gorong/ parit dan sebagainya yang besarnya tidak ditentukan, karena berdasarkan keikhlasan/sukarela. Sedangkan responden yang memberikan sumbangan tenaga, pada umumnya adalah responden yang lebih banyak memiliki waktu luang dan dapat bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, misalnya gotong-royong membersihkan parit, memperbaiki mushala/ tempat ibadah, memperbaiki jalan dan sebagainya.

Selanjutnya untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai variabel penilaian masyarakat tentang partisipasi dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada tabel rekapitulasi sebagai berikut:

TABEL IV.13
REKAPITULASI PENILAIAN MASYARAKAT TENTANG
ORGANISASI YANG DIKUTI MASYARAKAT
DI KELURAHAN BATU SEMBILAN

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	%
1	Bentuk Organisasi		
	▪ Organisasi profit	23	20,00
	▪ Organisasi non profit	35	30,43
	▪ Organisasi informal	57	49,57
2	Aktivitas Organisasi		
	▪ Aktivitas dibidang ekonomi	22	19,13
	▪ Aktifitas dibidang sosial	42	36,52
	▪ Aktivitas dibidang seni budaya	51	44,35
3	Keikutsertaan masyarakat dalam berorganisasi		
	▪ Atas kemauan sendiri	56	48,70
	▪ Karena terpaksa/Adanya paksaan	35	30,43
	▪ Karena ikut-ikutan	24	20,87
4	Intensitas kehadiran dalam pertemuan		
	▪ Selalu hadir (lebih dari 75%)	46	40,00
	▪ Sering (hadir 50-75%)	39	33,91
	▪ Kadang-kadang (hadir kurang dari 50%)	30	26,09
5	Intensitas memberi sumbangan		
	▪ Sumbangan pemikiran	30	26,09
	▪ Sumbangan uang/materi	41	35,65
	▪ Sumbangan tenaga	44	38,26

Sumber : Data olahan Tabel 4.7 s/d Tabel 4.12, 2005

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa rata-rata penilaian responden yang mengarah kepada partisipasi dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman belum kelihatan, sebaiknya masyarakat tentang partisipasi bahwa masyarakat lebih senang masuk organisasi informal yang bergerak dalam bidang sosial budaya, organisasi kekerabatan, yaitu organisasi yang non profit tetapi lebih berdampak kepada rasa diterima oleh masyarakat

setempat, karena itu tingkat kehadiran juga tinggi serta intensitas kehadiran dan kehadiran juga tinggi, karena kehadiran dan intensitas menyumbang berdampak sangat positif, mereka merasa diterima dilingkungannya, kekrabatan yang terjalin dapat berdampak timbulnya rasa senasib sepenanggungan, contoh kejadian angin puting beliung yang melanda desa Tobongbata yang berbatasan dengan Dompok laut, dimana beberapa warga Jawa Tengah rumahnya porak poranda, organisasi Among Mitro langsung membantu perbaikan rumah penduduk yang terkena musibah tersebut dengan mengadakan gotong royong

4.3 Analisis Terhadap Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman

Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman tidak terbatas pada rumah tempat tinggal yang harus permanen, namun yang lebih penting adalah memenuhi persyaratan kesehatan, dimana kondisi rumah bersih, tertata rapi, berbahan baku kuat, memiliki sarana/ prasarana lingkungan yang memadai (ventilasi, saluran pembuangan air limbah/ SPAL, ruang fungsional), kondisi lingkungan sekitar rumah yang sehat dan sebagainya. Selain itu, sikap masyarakat harus dapat memahami arti pentingnya pola hidup sehat dan lingkungan permukiman yang sehat, serta bagaimana menyikapi permasalahan yang timbul dalam lingkungan komunitas sosial. Hal ini tentunya dilandasi oleh pengetahuan dan kesadaran, sedangkan peningkatan pengetahuan dilandasi oleh meningkatnya pendidikan baik formal maupun non formal.

Dalam hal ini, variabel yang diteliti meliputi: perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal, perbaikan dan pemeliharaan sarana permukiman, perbaikan prasarana permukiman, sikap sosial, dan program pemerintah.

a. Perbaikan dan Pemeliharaan Rumah Tinggal

Variabel perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal merupakan penilaian yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal yang sehat tidak terlepas dari penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat untuk perbaikan lingkungan. Adapun kriteria dari variabel ini adalah: perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal secara rutin, perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal secara berkala, dan perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal secara insidental.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL IV.14
PENILAIAN RESPONDEN TENTANG
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH TINGGAL

NO.	PENILAIAN	f	%
1.	Swadaya	30	26,09
2.	Dibantu warga masyarakat	41	35,65
3.	Dibantu pemerintah	44	38,26
JUMLAH		115	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang melakukan perbaikan rumah tinggal secara swadaya sebanyak 30 orang atau

26,09%, yang melakukan perbaikan dengan bantuan warga masyarakat sebanyak 41 orang atau 35,65%, dan yang melakukan perbaikan dengan bantuan pemerintah sebanyak 44 orang atau 38,26%.

Responden yang memperbaiki dan memelihara rumah tinggalnya atas biaya swadaya jumlahnya relatif sedikit, dimana hal ini sangat berkaitan dengan penilaian masyarakat tentang perekonomian/kesejahteraan keluarga responden tersebut. Pada umumnya mereka telah mampu memperbaiki rumah tinggalnya apabila terdapat kerusakan dengan biaya sendiri, yaitu dengan cara mengupahkan kepada tukang. Demikian pula halnya dalam pemeliharaan, biasanya dilakukan dengan cara membersihkan/ menyapu, mengecat, menambal/dempul dan sebagainya yang dilakukan secara mandiri.

Adapun responden yang memperbaiki dan memelihara rumah tinggalnya dengan bantuan warga masyarakat, jumlahnya relatif lebih banyak. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa responden cenderung dibantu oleh tetangga atau warga sekitar dalam hal perbaikan rumah atau pemeliharaan, karena bukan hanya disebabkan oleh kondisi perekonomian keluarganya saja, namun juga lebih banyak oleh sebab adanya sikap gotong-royong yang ditunjukkan oleh warga tempatan.

Sedangkan responden yang memperbaiki dan memelihara rumah tinggalnya dengan bantuan pemerintah, biasanya mereka adalah kelompok masyarakat yang kondisi perekonomian keluarganya tergolong kurang mampu/miskin atau keluarga yang mengalami musibah bencana. Pada tahun 2004, melalui anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungpinang, telah menyalurkan dana bantuan perbaikan perumahan bagi keluarga miskin

sebanyak Rp.35.000.000,- untuk 4 (empat) buah rumah yang mengalami bencana angin puting beliung di Kampung Tobong Bata.

b. Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Permukiman

Variabel perbaikan dan pemeliharaan sarana permukiman seperti tempat peribadatan, tempat olahraga, tempat bermain dan sebagainya merupakan penilaian yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perbaikan drainase, sanitasi dan jalan lingkungan yang bersih tidak terlepas dari penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat bersama pemerintah untuk perbaikan lingkungan. Adapun kriteria dari variabel ini adalah: perbaikan dan pemeliharaan sarana/ prasarana permukiman secara rutin, perbaikan dan pemeliharaan sarana/ prasarana permukiman secara berkala, dan perbaikan dan pemeliharaan sarana/ prasarana permukiman secara insidental.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai perbaikan dan pemeliharaan sarana/ prasarana permukiman oleh masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL IV.15
PENILAIAN RESPONDEN TENTANG
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERMUKIMAN

NO	PENILAIAN	f	%
1.	Perbaikan secara rutin (tiap hari Jumat)	43	37,39
2.	Perbaikan secara berkala (3 bulan sekali)	32	27,83
3.	Perbaikan insidental (tidak terencana)	40	34,78
JUMLAH		115	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang melakukan perbaikan sarana permukiman secara rutin sebanyak 43 orang atau

37,39%, yang melakukan perbaikan secara berkala sebanyak 32 orang atau 27,83%, dan yang melakukan perbaikan secara insidental sebanyak 40 orang atau 34,78%.

Responden yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan sarana permukiman seperti tempat olahraga, tempat hiburan, tempat peribadatan, gedung pertemuan dan sebagainya secara rutin, menjelaskan bahwa mereka pada umumnya melakukan perbaikan/pemeliharaan tersebut setiap hari Jumat (seminggu sekali) sebagaimana telah disepakati dalam rapat warga setempat bersama Ketua RT/ RW. Hal ini sangat menguntungkan, karena dengan demikian segala sesuatu yang bersangkutan dengan kondisi sarana permukiman yang ada dapat cepat diketahui apabila terjadi kerusakan.

Selain itu, sebagian responden juga memberikan penjelasan bahwa kegiatan pemeliharaan/ perbaikan sarana permukiman dilakukan secara berkala, yaitu 3 bulan sekali sebagaimana hasil kesepakatan warga setempat. Hal ini tentunya sangat sulit untuk mengetahui/memantau kondisi sarana permukiman tersebut.

Sedangkan responden yang melakukan perbaikan/ pemeliharaan sarana permukiman secara insidental, terlebih lagi akan sangat sulit untuk memantau kondisi sarana permukiman tersebut, dan biasanya pelaksanaan kegiatan perbaikan/ pemeliharaan tersebut lebih didasarkan kepada adanya suatu kejadian (misalnya adanya kerusakan) dan tidak ada upaya untuk pencegahan.

c. Perbaikan dan Pemeliharaan Prasarana Permukiman

Variabel perbaikan dan pemeliharaan prasarana permukiman seperti drainase, jalan lingkungan, tempat/ bak sampah dan sebagainya merupakan penilaian yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perbaikan drainase, sanitasi dan jalan lingkungan yang bersih tidak terlepas dari penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat bersama pemerintah untuk perbaikan lingkungan.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai perbaikan dan pemeliharaan prasarana permukiman oleh masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**TABEL IV.16
PENILAIAN RESPONDEN TENTANG
PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA PERMUKIMAN**

NO	PENILAIAN	f	%
1.	Perbaikan secara rutin	35	30,43
2.	Perbaikan secara berkala	35	30,43
3.	Perbaikan insidental	45	39,13
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang melakukan perbaikan prasarana permukiman secara rutin sebanyak 35 orang atau 30,43%, yang melakukan perbaikan secara berkala sebanyak 35 orang atau 30,43%, dan yang melakukan perbaikan secara insidental sebanyak 45 orang atau 39,13%.

Responden yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan prasarana permukiman seperti bak sampah, drainase, jalan lingkungan dan sebagainya secara rutin, menjelaskan bahwa mereka pada umumnya melakukan perbaikan/

pemeliharaan tersebut setiap hari Jumat (seminggu sekali) sebagaimana telah disepakati dalam rapat warga setempat bersama Ketua RT/RW.

Selain itu, sebagian responden juga memberikan penjelasan bahwa kegiatan pemeliharaan/ perbaikan prasarana permukiman dilakukan secara berkala, yaitu 3 bulan sekali sebagaimana hasil kesepakatan warga setempat.

Sedangkan responden yang melakukan perbaikan/ pemeliharaan prasarana permukiman secara insidental, cenderung beranggapan bahwa perbaikan dan pemeliharaan prasarana lingkungan tersebut adalah tanggungjawab pemerintah. Sebagaimana telah terjadi banjir yang hampir setiap musim hujan melanda kawasan Bintan Center (tepat di depan Masjid Raya Batu 10), dimana hal tersebut lebih disebabkan oleh belum memadainya drainase yang dibangun oleh pemerintah yang tidak mampu menampung curahan air hujan, sehingga air menggenang pada badan jalan raya. Dalam hal ini, masyarakat setempat sudah berupaya melakukan pemeliharaan, yaitu dengan melakukan gotong-royong membersihkan parit/ gorong-gorong agar tidak terjadi penyumbatan, meskipun dilakukan secara insidental, yaitu pada saat terjadi banjir. Namun hal ini dirasakan belum dapat mengatasi permasalahan yang ada, karena pada dasarnya volume/ kapasitas daya tampung drainase yang ada memang tidak mampu lagi menampung air hujan di kawasan tersebut, sehingga diharapkan pemerintah dapat mengatasi masalah tersebut.

d. Sikap Sosial Masyarakat

Keanggotaan dalam organisasi kegiatan masyarakat juga dipengaruhi oleh kesadaran akan hakekat masalah dan kemudian menumbuhkan sikap untuk berbuat sesuatu, untuk kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan untuk mengatasi masalah perbaikan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, kriteria dalam variabel ini terdiri atas: sangat mudah menerima perubahan, cukup mudah menerima perubahan, dan sulit menerima perubahan.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai sikap sosial yang ditunjukkan oleh masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL IV.17
PENILAIAN RESPONDEN TENTANG
SIKAP SOSIAL MASYARAKAT

NO	PENILAIAN	f	%
1.	Sangat mudah menerima perubahan	36	31.30
2.	Cukup mudah menerima perubahan	47	40.87
3.	Sulit menerima perubahan	32	27.83
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang cenderung sangat mudah menerima perubahan sebanyak 36 orang atau 31,30%, cukup mudah menerima perubahan sebanyak 47 orang atau 40,87%, dan yang sulit menerima perubahan sebanyak 32 orang atau 27,83%.

Dalam hal ini, sebagian besar sikap responden cukup mudah menerima perubahan. Hal ini sangat dimaklumi mengingat sebagian besar warga masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan adalah pada pendatang dan bersifat heterogen.

Namun demikian, masih ada sebagian responden yang bersikap sulit menerima perubahan, dan ini biasanya dilakukan oleh kaum ‘orangtua’ dan etnis tertentu yang kurang menghendaki adanya perubahan yang dianggapnya dapat mengancam eksistensi mereka.

e. Program Pemerintah

Program pemerintah dalam mengatasi masalah perbaikan lingkungan permukiman sangat diperlukan oleh masyarakat, guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dan mampu memberikan manfaat atau keuntungan yang besar bagi masyarakat. Dalam hal ini program pemerintah memiliki kriteria sebagai berikut: sangat berorientasi kepada kebutuhan masyarakat lokal, cukup berorientasi kepada kebutuhan masyarakat lokal, dan kurang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat lokal.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai program pemerintah yang dilaksanakan di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**TABEL IV.18
PENILAIAN RESPONDEN TENTANG
PROGRAM PEMERINTAH**

NO	PENILAIAN	f	%
1.	Sangat berorientasi kebutuhan lokal	32	27.83
2.	Cukup berorientasi kebutuhan lokal	39	33.91
3.	Kurang berorientasi kebutuhan lokal	44	38.26
JUMLAH		100	100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang memberi penilaian bahwa program pemerintah yang dilaksanakan sangat berorientasi kepada kebutuhan lokal sebanyak 32 orang atau 27,83%, cukup berorientasi kepada kebutuhan lokal sebanyak 39 orang atau 33,91%, dan yang kurang berorientasi kepada kebutuhan lokal sebanyak 44 orang atau 38,26%.

Sebagian besar responden memberikan penilaian bahwa program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah (khususnya Pemko Tanjungpinang) di wilayah Kelurahan Batu Sembilan ternyata kurang berorientasi kepada kebutuhan lokal. Dapat diketahui bahwa, responden yang bersikap demikian adalah sebagian besar warga tempatan/ asli (bukan pendatang), dimana mereka beranggapan bahwa pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya yang menitikberatkan Kelurahan Batu Sembilan sebagai kawasan pengembangan Kota Tanjungpinang, dinilai belum dapat menyentuh kebutuhan warga tempatan, utamanya adalah peningkatan taraf kesejahteraan mereka. Hal ini patut diperhatikan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang, bahwa warga tempatan/ asli, pada umumnya sebagian besar telah tidak memiliki lahan (kecuali lahan rumah tinggalnya tersebut), karena sudah dijual kepada investor atau kepada penduduk pendatang. Pada umumnya kaum pendatang lebih berhasil ketimbang warga tempatan/ asli dalam hal peningkatan perekonomian/ kesejahteraan keluarganya.

Selanjutnya untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai variabel pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman di Kelurahan Batu Sembilan, dapat dilihat pada tabel rekapitulasi sebagai berikut:

TABEL IV.19
REKAPITULASI PENILAIAN MASYARAKAT DALAM
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DI KELURAHAN BATU SEMBILAN

NO	PENILAIAN PARTISIPASI	JUMLAH	%
1	Perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal		
	▪ Swadaya	30	26,09
	▪ Bantuan warga sekitar	41	35,65
	▪ Bantuan pemerintah	44	38,26
2	Perbaikan dan pemeliharaan sarana lingkungan permukiman		
	▪ Rutin	43	37,39
	▪ Berkala	32	27,83
	▪ Insidental	40	34,78
3	Perbaikan dan pemeliharaan Prasarana lingkungan permukiman		
	▪ Rutin	35	30,43
	▪ Berkala	35	30,43
	▪ Insidental	45	39,13
4	Sikap sosial		
	▪ Sangat mendukung	36	31,30
	▪ Cukup mendukung	47	40,87
	▪ Kurang mendukung	32	27,83
5	Program pemerintah		
	▪ Sangat berorientasi kebutuhan lokal		
	▪ Cukup berorientasi kebutuhan lokal		
	▪ Kurang berorientasi kebutuhan lokal		

Sumber: Data Olahan Tabel 4.12 s/d Tabel 4.16, 2005.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa penilaian responden yang mengarah kepada perbaikan pada rumah tinggal sangat mengharapkan bantuan pemerintah ini juga disebabkan sosial ekonomi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, walaupun ada juga masyarakat yang mampu memperbaiki rumah tinggalnya dengan mengupahkannya kepada orang lain, sehingga tidak heran jika Kelurahan Batu Sembilan bisa dikatakan kumuh, begitu juga pada perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman juga masyarakat menganggap itu tugas pemerintah pada skala yang besar tetapi pada skala yang kecil seperti perbaikan dan pemeliharaan musyolah, gedung pertemuan, tempat olahraga, masyarakat mau bergotong royong setiap jumat,

keseepakatan ini didapat dalam pertemuan warga dengan RT/R hal ini berkaitan juga dengan sikap sosial masyarakat yang mudah menerima perubahan, walau mereka juga berpendapat pembangunan di Kelurahan Batu Sembilan tidak berpihak kepada kebutuhan lokal

4.4 Rangkuman Analisis

Rangkuman analisis dari ketiga variabel karakteristik, partisipasi perbaikan lingkungan permukiman dan perbaikan lingkungan permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.20
RANGKUMAN ANALISIS JAWABAN RESPONDEN

NO	VARIABEL	JAWABAN RESPONDEN	%
1	Karakteristik <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis kelamin ▪ Umur ▪ Pendidikan ▪ Mata pencaharian ▪ Penghasilan ▪ Suku/etnis 	Laki-laki 31-40 tahun SLTA Petani Dibawah Rp.700.000,- Jawa	83,48 46,09 38,26 37,39 80,00 37,39
2	Penilaian partisipasi masyarakat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bentuk organisasi ▪ Aktifitas organisasi ▪ Keikutsertaan ▪ Tingkat kehadiran ▪ Intensitas memberikan sumbangan 	Informal Seni budaya Kesadaran sendiri Selalu hadir tenaga	49,57 44,35 48,70 40,00 38,26
3	Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaikan rumah tinggal ▪ Perbaikan dan pemeliharaan sarana permukiman ▪ Perbaikan dan pemeliharaan prasarana lingkungan permukiman ▪ Sikap sosial ▪ Program pemerintah 	Dibantu pemerintah Secara rutin/ tiap Jumat Insidentil Cukup mudah menerima perubahan Kurang berorientasi pada kebutuhan lokal	38,26 37,39 39,13 40,87 38,26

Sumber: Olahan data dari tabel IV.1 s/d tabel IV.19 tahun 2005

Dari tabel diatas dapat dirangkum secara keseluruhan analisis adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman tidak akan berjalan jika masih didapatnya kemiskinan (mereka tidak mampu untuk berpartisipasi dalam bentuk memberikan sumbangan/materi), ketidak acuhan masyarakat akan kondisi lingkunganya yang serta pembangunan yang tidak berdasarkan kebutuhan lokal yaitu pembangunan dibidang kesejahteraan/ ekonomi kerakyatan, anehnya mereka merasa nyaman dengan keadaan demikian, hal ini disebabkan ketidak tahuan, walau didapat fakta bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yang bersedia menyumbangkan tenaganya, kekerabatan yang erat melaui organisasi informal yang mereka ikuti merupakan modal untuk kegaitan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, khususnya mengenai rangkuman hasil analisis baik mengenai karakteristik, partisipasi perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman, maka selanjutnya dapat dirumuskan suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Karakteristik masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan:

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kelurahan Batu Sembilan sebagian besar adalah laki-laki (83,48%). Sebagian besar penduduk berusia 31-40 tahun (46,09%) dengan tingkat SLTA (38,26%) dan bermata pencaharian sebagai petani (37,39%). Penghasilan sebagian besar penduduk adalah kurang dari Rp.700.000,- (80,00%), dan sebagian besar adalah suku/etnis Jawa (37,39%). Apabila dilihat dari karakteristik jenis kelamin, maka dapat dipahami bahwa pada masyarakat kita masih memiliki paham paternalistik, dimana kaum laki-laki 'kedudukannya' lebih tinggi dan lebih mampu menjangkau akses sosial yang luas, sehingga hal ini memungkinkan mereka lebih aktif dalam berpartisipasi. Dilihat dari usia, maka jelaslah bahwa usia masyarakat adalah usia produktif yang memungkinkan mereka mendayagunakan energinya untuk aktif dalam berpartisipasi. Dari segi pendidikan sebagian besar adalah SLTA, ini berarti bahwa masyarakat telah memiliki bekal yang cukup serta memiliki wawasan/pandangan yang lebih baik dalam rangka berpartisipasi untuk

pembangunan. Namun demikian, apabila dilihat dari karakteristik mata pencaharian dan penghasilan, maka hal ini menjadi suatu fakta yang menarik, dimana masyarakat yang tergolong 'miskin' ternyata lebih aktif berpartisipasi (kontradiksi dengan Teori Kebutuhan Maslow, khususnya tentang hirarkhie kebutuhan *Self-Actualization* yang lebih didahulukan daripada kebutuhan pokoknya/*Primary Needs*). Namun fakta menunjukkan bahwa hal tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik lainnya, seperti suku/etnis masyarakat yang cenderung memiliki kultur yang unik, sebagaimana umumnya kaum perantau yang lebih memiliki nilai keterikatan/persatuan yang kuat karena didorong oleh kebutuhan akan perlindungan dan pengakuan.

2. Masyarakat hanya senang memasuki organisasi informal yang beraktifitas seni budaya (44,35%). Disini terlihat masyarakat lebih antusias untuk menghadirinya dan memberikan sumbangan, hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk diakui atau diterima dilingkungannya, mereka merasa nyaman dengan memasuki organisasi-organisasi yang bersifat kekerabatan, seperti paguyuban, perkumpulan fam/ marga dll, karena dinilai lebih banyak dan lebih mudah memberikan manfaat (bantuan) kepada setiap anggotanya yang memerlukan bantuan baik moril maupun materiil dibandingkan dengan organisasi untuk pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman.
3. Dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman, khususnya dalam perbaikan rumah tinggal, ternyata sebanyak 38,26% masyarakat mendapat bantuan dari pemerintah (khususnya masyarakat di Kp. Tobong

Bata yang pernah mengalami bencana alam dan di RT 11/RW 4 yang mengalami kebakaran tahun 2004). Namun demikian, masyarakat pada umumnya telah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman dengan ikut gotong-royong setiap hari Jumat (37,39%).

4. Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman, khususnya sarana dan prasarana permukiman, masyarakat mau berpartisipasi jika kegiatan tersebut berskala kecil seperti perbaikan mushola, ruang pertemuan, drainase dll, tetapi dalam perbaikan rumah tinggal dan perbaikan dan pemeliharaan dalam skala yang besar seperti kerusakan yang tidak dapat dicegah, mereka beranggapan itu adalah tugas pemerintah, sehingga mereka tidak peduli dengan keadaan permukiman dimana mereka tinggal.
5. Masyarakat juga beranggapan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak memihak kepada kebutuhan lokal masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan ini dapat dilihat dari jawaban masyarakat pada variabel sikap sosial masyarakat dan program pemerintah.
6. Di lapangan ternyata ditemui bahwa hal-hal yang potensial/ berpeluang untuk mendukung adanya partisipasi masyarakat, ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang berjenis kelamin lelaki, usia produktif dan bersedia menyumbangkan tenaga, sikap masyarakat yang cukup mudah menerima perubahan, heterogen dan saling menghormati satu dengan yang lain.

5.2 Rekomendasi

Untuk menindaklanjuti beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bagian terdahulu mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan Kecamatan Tanjungpinang Timur maupun Lurah Batu Sembilan, yaitu perlunya pembinaan partisipasi agar masyarakat dapat lebih banyak memiliki tanggungjawab untuk memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman secara optimal. Dalam hal ini peranan organisasi kemasyarakatan yang ada seperti: LPM, LSM, Karang Taruna, PKK dan sebagainya sangat penting dan harus mampu menetapkan program/ kegiatan yang mengarah kepada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik. 1990. *Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*. Jakarta: LP3ES.
- Budihardjo, Eko(ed). 1998. *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Bandung: Alumni.
- Catanese, Anthony James dan James C. Snyder. 1988. *Perencanaan Kota, Terjemahan Ir. Wahyudi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Catanese, Anthony James dan James C. Snyder. 1996. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Erlangga.
- , *Encyclopedia of Sosial Science Vo.12*. New York: The Macmillan Company.
- Evers, Dyana. 1989. *Terjemahan: Beberapa Persoalan Mengenai Pendapatan Subsisten*. Jakarta: Pelita.
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM.
- Handoyoningrat, Soewarno. 1980. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV.Haji Masagung.
- Ihalaw, John JOI, 2000. *Methodology Research*. Salatiga: Program Pasca Sarjana Magister Studi Pembangunan UKSW.
- Iskandar, Jusman. 1994. *Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali
- Jennifer Rietbergen, Mc Cracken, Deepa Narayan. 1998. *Participation And Sosial Assessment Tools And Techniques*. Washington DC: The World Bank.
- J. Muller. 1989. *Partisipasi Bukan Unsur Baru Dalam Pembangunan*. Jakarta: Kompas.
- Kalsoem, Clara DM. 1988. *Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kasryno Faisal dan Joseph F. Stepanek. *Dinamika Pembangunan Pedesaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985.

- Kuntjaraningrat. 1980. *Manusia dan Kebudayaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koentjaraningrat. 1987. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Mikkelsen, Britha. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan, Sebuah Buku Pegangan bagi para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Millet, Robert. 1981. *Paradigma Organisasi Modern. Terjemahan: Seri Manajemen No. 55*, Jakarta: PPM. Erlangga.
- Murdoch. 1994. *Community Participation in Practice Casebook*. Western Australia: The Institute for Science and Technology Policy.
- Ndraha, Taliziduhu. 1983. *Partisipasi Dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Oetomo. 1980. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, Emil. 1989. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Pelita
- Sayogyo. 1987. *Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sastrosaputro, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Schein, Edgar, H. 1982. *Psikologi Organisasi. Terjemahan: Seri Manajemen No. 8*. Jakarta: PPM. Erlangga.
- Simanjuntak, Tigor. 1982. *Perspektif Pembangunan*. Jakarta: CV. Masagung.
- Simon, Herbert, A. 1982. *Administration Behavior*. Jakarta: Bina Aksara
- Slamet, 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soekartawi dkk. 1993. *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Masyarakat Kecil*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soelaiman, Holil. 1985. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berencana*. Bandung: BSSW.

- Soetrisno, Loekman. 2004. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Jakarta: Kanisius.
- Steers, Richard M. 1980. *Efektivitas Organisasi. Terjemahan: Seri Manajemen No. 61*. Jakarta: PPM. Erlangga.
- Suharsimi Arikunto. 1986. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sutarto. 1980. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Usman, Kasim. 1990. *Migrasi di Kota-kota Besar*. Jakarta: PLPIIS.
- Vredembregt J., 1987. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Warella, Somair. 1985. *Sumber Penghasilan dan Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zen, MT. 1988. *Hidup Damai Dengan Alam Lingkungan Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Gramedia.

KUESIONER

Penilaian Masyarakat Tentang Partisipasi Dalam Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang

Petunjuk pengisian Kuesioner:

- a. Isilah jawaban dengan memberikan tanda silang atau dilingkari pada pertanyaan pilihan.
- b. Isilah jawaban pada tempat lain yang sudah disediakan untuk pertanyaan yang membutuhkan penjelasan.
- c. Mohon jawaban atas pertanyaan ini diisi dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

I. KARAKTERISTIK RESPONDEN

No. Responden:.....

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|--------------|
| a. Nama Responden | : | | |
| b. Jenis Kelamin | : | 1. Laki-laki | 2. Perempuan |
| c. Umur | : | tahun | |
| d. Pendidikan | : | | |
| e. Mata Pencaharian | : | | |
| f. Penghasilan Rata-rata | : | Rp | s/d Rp. |
| g. Suku/Etnis | : | | |
| h. Alamat Rumah | : | | |
| | | Telp..... | |
| | | RT.....RW | |
| | | Kelurahan | |
| | | Kecamatan | |

II. PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk Organisasi

1. Menurut pendapat Bapak/Ibu, organisasi yang sekarang ini telah dibentuk seperti Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Anda aktif di dalamnya adalah organisasi yang berbentuk?
 - a. Organisasi profit (untuk mencari keuntungan secara finansial)
 - b. Organisasi non profit (tidak mencari keuntungan finansial)
 - c. Organisasi informal

Aktivitas Organisasi

2. Bagaimana aktivitas organisasi masyarakat seperti RT, LPM, Pengajian/Wiridan, Arisan, Paguyuban dan sebagainya di daerah ini, apakah menyentuh kebutuhan masyarakat setempat, khususnya dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman?
 - a. Sangat menyentuh kebutuhan masyarakat setempat

- b. Cukup menyentuh kebutuhan masyarakat setempat
- c. Kurang menyentuh kebutuhan masyarakat setempat

Keanggotaan Dalam Organisasi

3. Bagaimana keanggotaan Anda dalam organisasi masyarakat (RT, LPM, Arisan, Paguyuban, Wirid dll.) disini?
 - a. Menjadi anggota atas kesadaran sendiri
 - b. Menjadi anggota karena terpaksa
 - c. Tidak tahu alasannya (ikut-ikutan)

Intensitas kehadiran dalam pertemuan

4. Jika diprosentasikan, kira-kira berapa persen kehadiran anda dalam rapat-rapat mengenai perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman yang pernah diadakan di Kelurahan ini?
 - a. Selalu (Lebih dari 75%)
 - b. Sering (Antara 50%-75%)
 - c. Kadang-kadang (Kurang dari 50%).

Intensitas memberi sumbangan

5. Jika dikategorikan, kira-kira kategori mana sumbangan yang telah Anda berikan dalam kegiatan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman yang pernah diadakan di Kelurahan ini?
 - a. Sumbangan pemikiran (Lebih dari 75% berkaitan dengan upaya perbaikan dan pemeliharaan lingkungan).
 - b. Sumbangan uang/materi (Lebih dari 75% berkaitan dengan upaya perbaikan dan pemeliharaan lingkungan).
 - c. Sumbangan tenaga (Lebih dari 75% berkaitan dengan upaya perbaikan dan pemeliharaan lingkungan).

III. PERBAIKAN & PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal

6. Menurut Anda, kegiatan perbaikan dan pemeliharaan rumah tinggal masyarakat di Kelurahan ini dilakukan secara?
 - a. Rutin (setiap minggu/ bulan)
 - b. Berkala (setiap tiga bulan/ enam bulan/ satu tahun)
 - c. Insidental (sewaktu-waktu jika diperlukan)

Perbaikan dan pemeliharaan sarana permukiman

7. Menurut Anda, kegiatan perbaikan dan pemeliharaan sarana permukiman (seperti: tempat peribadatan, sarana olahraga, tempat bermain dsb.) oleh masyarakat di Kelurahan ini dilakukan secara?
 - a. Rutin (setiap minggu/ bulan)
 - b. Berkala (setiap tiga bulan/ enam bulan/ satu tahun)
 - c. Insidental (sewaktu-waktu jika diperlukan)

Perbaikan dan pemeliharaan prasarana permukiman

8. Menurut Anda, kegiatan perbaikan dan pemeliharaan prasarana permukiman (seperti: drainase, jalan lingkungan, tempat/bak sampah dsb.) oleh masyarakat di Kelurahan ini dilakukan secara?
- Rutin (setiap minggu/ bulan)
 - Berkala (setiap tiga bulan/ enam bulan/ satu tahun)
 - Insidental (sewaktu-waktu jika diperlukan)

Sikap Sosial

9. Menurut Anda, bagaimana sikap masyarakat di Kelurahan ini terhadap kondisi lingkungannya?
- Sangat mudah menerima perubahan
 - Cukup mudah menerima perubahan
 - Sulit menerima perubahan

Program pemerintah

10. Program-program pemerintah dalam mengatasi masalah perbaikan lingkungan permukiman seperti program 'Jumat Bersih', Penyuluhan Kesehatan Lingkungan, Penghijauan dan sebagainya yang dilaksanakan disini, menurut Bapak/Ibu apakah program tersebut berorientasi kepada kebutuhan masyarakat disini?
- Sangat berorientasi kepada kebutuhan masyarakat
 - Cukup berorientasi kepada kebutuhan masyarakat
 - Kurang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Yulianti, dilahirkan di Tanjungpinang, pada tanggal 3 Agustus 1958, merupakan putri ke lima dari delapan bersaudara, anak dari pasangan H. Syafii Yasmi dan Hj. Liberty (alm). Alamat rumah di Jln. Ahmad Yani no.24 Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau.

Pada tanggal 6 Desember 1986 melangsungkan pernikahan dengan suaminya Harpomo dan dikaruniakan 3 orang putra yaitu si sulung Harya Ajiseno, saat ini kuliah di Hukum Universitas Pasundan Bandung semester satu, kedua Bintang Laksono (meninggal 6 jam setelah dilahirkan), dan si bungsu putrinya Melody Trusty saat ini duduk di bangku SMP kelas satu

Menyelesaikan pendidikan SD tahun 1971 di Tanjungpinang, SMP tamat tahun 1974 juga di Tanjungpinang, melanjutkan ke SPR (Sekolah Pengatur Rawat) di Padang tahun 1979, Diploma I Kebidanan tahun 1984 di Padang, SMU (Uper) tahun 1998 di Tanjungpinang, S-1 (Sosial) STISIPOL RAJA HAJI Tanjungpinang tahun 2002, S-2 di Universitas Diponegoro tahun 2005.

Pengalaman kerja dari tahun 1979 s/d 2001 bertugas di RSUD Tanjungpinang, jabatan terakhir sebagai Kasubsi Pelayanan. Pada bulan Oktober 2002-Maret 2002 bertugas di Kantor Kesbang dan Linmas. Selanjutnya bulan April 2002-September 2003 dinas ke Bagian Kepegawaian Setdako Tanjungpinang. Kemudian pada bulan September 2003-Januari 2004 kembali ke RSUD Tanjungpinang dengan jabatan Kabid Pelayanan Medik dan pada bulan April 2003-Juni 2005 di Dinas Kesehatan sebagai Kasubdin Promosi Kesehatan. Mulai bulan Juli 2005 s/d sekarang sebagai Kasubsi Pemberdayaan Peran serta masyarakat dan Organisasi Perempuan pada Bagian Pemberdayaan Perempuan Setdako Tanjungpinang.